



**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP
PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL**

(Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Bank di BEI)

Disusun oleh:

M. Bintang Ramadhan Handoko Putra

NIM. 155020307111037

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Derajat Sarjana Ekonomi



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BRAWIJAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2021

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Artikel jurnal dengan judul :

“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Bank di BEI)”

Yang disusun oleh:

Nama : M. Bintang Ramadhan

NIM : 155020307111037

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dosen Pembimbing : Putu Prima Wulandari, SE., MSA., Ak.

Malang, 09-07-2021

Dosen Pembimbing.

Putu Prima Wulandari, SE., MSA., Ak.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul

**“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual
(Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Bank di BEI)”**

Yang Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Bintang Ramadhan

NIM 155020307111037

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji pada tanggal 20 September 2021
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Putu Prima Wulandari, MSA., Ak.

NIP. 2011068702152001

(Dosen Pembimbing)

2. Aulia Fuad Rahman, D.B.A., Ak., SAS.

NIP. 197409102002121001

(Dosen Penguji 1)

3. Devy Pusposari, M.Si., Ak.

NIP. 197511052003122001

(Dosen Penguji 2)

Malang, 1 Nopember 2021

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Dr. Dra. Arum Prastiwi, M.Si., Ak.

NIP. 196707142005012001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Bintang Ramadhan Handoko Putra

NIM : 155020307111037

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akutansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP MODAL INTELEKTUAL (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR BANK DI BEI)

Adalah benar-benar karya hasil saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari penelitian orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjantaannya)

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar, untuk dapat dipergunakan bila diperlukan.

Jakarta, 10 Juli 2021

Pembuat Pernyataan,



M. Bintang Ramadhan
NIK. 155020307111037

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xi
BAB I.....	I
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Attribution Theory.....	10
2.1.2. Teori Agensi.....	11
2.1.3. Pengungkapan IC.....	11
2.1.4. Penelitian Terdahulu.....	16
2.2. Kerangka Pemikiran.....	25
2.3. Pengembangan Hipotesis.....	29
2.3.1. Ukuran Dewan Komisaris.....	29
2.3.2. Kepemilikan <i>Blockholder</i>	31
2.3.3. Kepemilikan Pemerintah.....	33
2.3.4. Masa Jabatan Dewan Komisaris.....	35
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN.....	37



3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	37
3.1.1. Variabel Dependen.....	37
3.1.1. Variabel Independen.....	41
3.1.2. Variabel Kontrol.....	42
3.2. Populasi dan Penentuan Sampel.....	45
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	46
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	46
3.5. Metode Analisis.....	47
3.5.1. Uji Statistik Deskriptif.....	47
3.5.2. Uji Asumsi Klasik.....	47
3.5.3. Uji Hipotesis.....	50
BAB IV.....	53
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	53
4.2. Analisis Data.....	54
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	54
4.2.2. Uji Asumsi Klasik.....	56
4.2.3. Uji Hipotesis.....	61
4.3. Analisis Data.....	66
4.3.1. Ada Pengaruh Positif antara Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan IC, <i>Ceteris Paribus</i>	67
4.3.2. Ada Pengaruh Positif antara Kepemilikan <i>Blockholder</i> dan Pengungkapan IC, <i>Ceteris Paribus</i>	68
4.3.3. Ada Pengaruh Positif antara Kepemilikan Pemerintah dan Pengungkapan IC, <i>Ceteris Paribus</i>	70
4.3.4. Ada Pengaruh Negatif antara Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Pengungkapan IC, <i>Ceteris Paribus</i>	71
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Keterbatasan.....	73
5.3. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN A.....	82
LAMPIRAN B.....	84



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Kerangka Kerja Modal Intelektual.....	40
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	43
Tabel 4.1 Data Hasil Pemilihan Sampel	53
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	55
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model Regresi	61
Tabel 4.9 Uji Statistik t Model Regresi.....	63
Tabel 4.10 Uji Statistik F Model Regresi.....	65
Tabel 4.11 Interpretasi Hasil	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pengungkapan Beberapa Item Modal Intelektual pada Perusahaan Sektor Perbankan Tahun 2017.....14

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....28

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Bank di BEI)

Penulisan ini diperlukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan masa studi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Penghargaan dan ucapan terima kasih diberikan kepada orang tua penulis, Bapak Rubiyo dan Ibu Hesty Damayanti yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, dan karunia di dunia dan akhirat atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan ucapan terima kasih juga diberikan kepada Ibu Putu Prima Wulandari, MSA., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah mendampingi dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi. Penulis juga mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Nurkholis, SE., M.Bus.(Acc), Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
2. Dr. Drs. Roekhudin, Ak., CSRS., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Brawijaya Malang.



3. Sahabat-sahabat SMAN 61 Jakarta (Fadhil, Ahda, Deva, Dhika, Bagus, Garry, Budin, Ari, Eros, Qolby, Ginda, Farhad) atas dukungan moral serta materil selama penulisan skripsi.

4. Sahabat Badan Pengurus Harian serta seluruh Keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, diharapkan saran dan kritik yang membangun demi penulisan skripsi yang bermanfaat.

Malang, 9 Februari 2020

Penulis,

Muh. Bintang Ramadhan Handoko Putra



PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Bank di BEI)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran tata kelola perusahaan dalam pengungkapan modal intelektual. Penelitian ini menggunakan kinerja perusahaan, struktur modal dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2017. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling. Jumlah sampel penelitian ini adalah 42 perusahaan.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, kepemilikan pemegang blok dan kepemilikan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan masa jabatan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

Kata Kunci : tata kelola perusahaan, pengungkapan modal intelektual

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the role of corporate governance in modal intelektual disclosure. This study uses firm performance, capital structure and firm size as control variables.

The population in this study were banking companies on the Indonesia Stock Exchange for the period 2015 - 2017. The sample was determined by the purposive sampling method. The number of samples in this study were 42 companies.

This study uses multiple regression analysis for hypothesis testing. The results of this study indicate that the size of the board of commissioners, block holder ownership and government ownership have a positive and significant effect on modal intelektual disclosure. Meanwhile, the term of office of the board of commissioners has no effect on the disclosure of modal intelektual.

Keywords : corporate governance, modal intelektual disclosure

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan konvensional perusahaan telah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan investasi. Investor yang mempercayakan keuangan mereka saat ini dan masa depan kepada pasar tersebut, secara tidak langsung bergantung pada informasi yang disediakan dalam laporan keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan (CFA, 2007). Meskipun benar, pernyataan ini memiliki kekurangan dari perspektif pasar modal. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang terdaftar di pasar modal didorong oleh penciptaan dan penggunaan aset tidak berwujud, seperti modal intelektual (IC). IC merupakan kumpulan sumber daya tak berwujud, pengetahuan, pengalaman, dan kekayaan intelektual yang dimiliki dan digunakan oleh organisasi, komunitas, negara atau masyarakat untuk menciptakan nilai ekonomi, utilitas, sosial dan lingkungan (Dumay, 2016). Suwarti (2016) menyatakan bahwa modal intelektual merupakan kekayaan intelektual yang digunakan perusahaan untuk mengelola berbagai risiko, ancaman, dan permasalahan yang mungkin timbul dan dapat menghambat kehidupan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang mengharuskan perusahaan untuk dapat menunjukkan kapasitasnya diluar sumber daya yang berwujud. Saat memasuki era informasi, perusahaan mulai menyadari bahwa untuk menciptakan keunggulan bersaing dan menjaga eksistensi mereka tidak lagi cukup hanya dengan kekayaan fisik yang dimiliki, tetapi lebih kepada aset tak berwujud seperti inovasi, cara pengelolaan organisasi dan

pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki (Aprisa, 2016; Junaedi, 2017).

Pengetahuan asset tak berwujud telah diakui sebagai bagian dari komponen bisnis dan sumber daya startegis yang memiliki peranan penting dan lebih *sustainable* (Solikhah dkk, 2010). Dengan demikian, konteks yang tepat untuk menggambarkan bisnis berbasis pengetahuan diistilahkan sebagai *intellectual disclosure* atau pengungkapan modal intelektual.

Literatur yang telah mendokumentasikan secara spesifik menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dari tata kelola perusahaan secara signifikan mempengaruhi tingkat dan kualitas pengungkapan sukarela (Elshandidy & Neri, 2015). Tata kelola perusahaan merupakan mekanisme yang dirancang untuk mamantau dan menyelesaikan keputusan manajerial, dan untuk memastikan bahwa operasi yang dijalankan perusahaan berjalan dengan efisien sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. (Kothari & Kothari, 2000) berpendapat bahwa kualitas laporan keuangan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh standar akuntansi, namun oleh hal yang lebih bersifat kualitatif seperti tata kelola perusahaan. Keenan dan Aggestam (2001) juga berpendapat bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh yang bermanfaat dalam pengembangan dan pengelolaan IC perusahaan dengan melihat sistem yang ada di perusahaan demi memastikan bahwa pemangku kepentingan mendapatkan informasi mengenai kinerja dari perusahaan tersebut melalui sudut pandang yang lebih spesifik. Pendapat ini juga didukung oleh Donnelly dan Mulchachy (2008), bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif dapat meningkatkan tingkat pengungkapan perusahaan dimana pengungkapan tersebut telah melebihi apa yang diwajibkan oleh mekanisme pertukaran saham yang telah berlaku.



Melihat sudut pandang tersebut, penelitian ini akan menelusuri pengaruh dari tata kelola perusahaan pada pengungkapan IC di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Melihat penelitian yang dilakukan pada negara berkembang seperti Indonesia, masih terdapat sedikit kesadaran dan ilmu yang mendorong kepada pentingnya pengungkapan modal intelektual pada laporan keuangan perusahaan. Namun meski demikian, pengungkapan IC di Indonesia mulai berkembang dengan adanya peraturan mengenai aktiva tidak berwujud yang dijelaskan di dalam PSAK No. 19 (revisi 2000) muncul. Menurut PSAK No. 19, aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau tujuan administrative. Hal ini juga didukung oleh keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-431/BL/2012 mengenai kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunannya dimana laporan tersebut memuat tentang tata kelola perusahaan. Hal ini mendorong peneliti untuk membuktikan apakah perusahaan yang memiliki dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan efisien akan secara tidak langsung mendorong perusahaan untuk lebih banyak mengungkapkan informasi dimana salah satu informasi tersebut adalah pengungkapan IC, dimana secara eksplisit penjelasan mengenai modal intelektual belum diatur didalam standar akuntansi keuangan (Pradita & Solikhah, 2017)

Untuk melihat kondisi yang terjadi di Indonesia, PriceWaterhouseCoopers melakukan survey terhadap organisasi-organisasi untuk mengetahui tipe kebutuhan informasi investor (Eccles et al (2001) dalam Bozzolan et al (2003). Di antara sepuluh tipe informasi hanya tiga yang merupakan tipe informasi keuangan (cash

flow, earnings, gross margin) dan sisanya yaitu tujuh yang terdiri dari data internal perusahaan dan lima tipe lainnya yang dipertimbangkan adalah intangible. Dari survey tersebut tipe informasi yang 4 dipertimbangkan oleh investor lebih banyak masuk dalam komponen modal intelektual. Namun pada kenyataannya tipe informasi ini tidak diungkapkan oleh manajer, dan hal ini menyebabkan adanya *information gap* (Bozzolan et al, 2003).

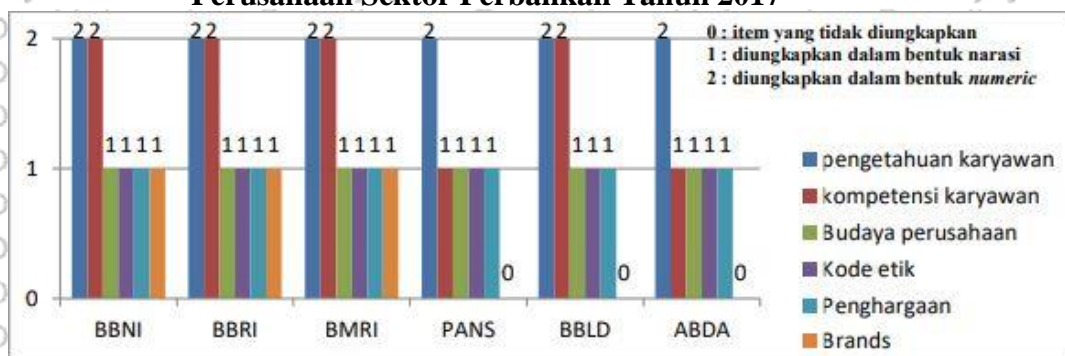
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laporan fraud semester perbankan terkait dampak perkembangan teknologi informasi di perbankan sampai Juni 2015 sebanyak 3.173 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp104,58 miliar. Deputi Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan OJK Tris Yulianta mengungkapkan penerapan teknologi informasi di perbankan di Indonesia memiliki dampak tersendiri termasuk potensi risikonya. Dalam hal ini, bank perlu berhati-hati dan harus terus waspada. Potensi risiko yang dihadapi bank bertambah khususnya risiko operasional, hukum, dan reputasi. Bahkan, perkembangan layanan seperti internet, e-commerce dan e-banking membuka peluang besar untuk cyber crime di Indonesia. Pada sisi lain, perkembangan produk perbankan berbasis teknologi di antaranya berupa *electronic banking* memberi kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan secara non kas setiap saat melalui jaringan elektronik. Sehingga dapat diketahui bahwa 7 teknologi informasi yang merupakan salah satu item pengungkapan modal intelektual merupakan suatu hal yang penting.

Teknologi informasi menentukan bagaimana bank mengembangkan kegiatan usahanya sesuai dengan strategi bisnis dan blueprint teknologi informasi yang ditetapkan oleh bank sehingga bank perlu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi disamping untuk meningkatkan efisiensi kegiatan

operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, juga meningkatkan daya saing. Di Indonesia pengungkapan modal intelektual masih belum dikenal secara luas. Puasanti (2013), perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan *conventional based* dalam membangun bisnisnya sehingga produk yang dihasilkannya masih miskin kandungan teknologi. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Cahya (2013), tingkat modal intelektual *disclosure* di Indonesia masih rendah (rata-rata hanya sebanyak 34,92% dari total 56 item modal intelektual). Berikut merupakan pengungkapan modal intelektual perusahaan perbankan tahun 2017:

Gambar 1.1

Grafik Pengungkapan Beberapa Item Modal Intelektual pada Perusahaan Sektor Perbankan Tahun 2017



(Sumber: www.idx.co.id, diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa beberapa komponen pengungkapan modal intelektual pada perusahaan sektor keuangan yang meliputi PT Bank BNI (Persero) Tbk, PT Bank BRI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Panin Sekuritas Tbk, Buana Finance Tbk, dan Asuransi Bina Dana Arta Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia beberapa komponen modal intelektual tidak diungkapkan dan telah diungkapkan dalam bentuk narasi maupun numerik. Dari



hasil Gambar 1.1 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa item modal intelektual yang belum diungkapkan di dalam laporan keuangan tahunan perusahaan sehingga memunculkan permasalahan bahwa pentingnya modal intelektual tidak searah dengan luasnya pengungkapan modal intelektual yang dilakukan oleh perusahaan

Berdasarkan penelitian sebelumnya, yang menjadi *research gap* dalam penelitian ini merupakan pengujian terhadap pengaruh antara masa jabatan dewan komisaris dan pengungkapan IC. Melihat dari penelitian sebelumnya, karakteristik dewan komisaris itu sendiri ditunjukkan oleh ukuran dewan komisaris komisaris, dan masa jabatan dewan komisaris. Sementara struktur kepemilikan ditunjukkan oleh kepemilikan *blockholder* dan kepemilikan pemerintah. Namun masa jabatan dewan komisaris itu sendiri belum ada penelitian terdahulu yang menguji mengenai pengaruh antara masa jabatan dewan komisaris dan pengungkapan IC. Selain itu tidak adanya peraturan atau *framework* yang terkait dengan penungkapan modal intelektual juga menjadi *research gap*. Vafeas (2003) menjelaskan bahwa dewan yang memiliki masa jabatan yang panjang akan memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang perusahaan dan perubahan di dalam lingkungan bisnis. Berkembangnya fenomena modal intelektual di Indonesia diawali dari munculnya peraturan tentang aset tak berwujud (PSAK No. 19), namun secara eksplisit penjelasan mengenai modal intelektual belum diatur didalam standar akuntansi keuangan ini (Pradita & Solikhah, 2017).

Penelitian dimulai dengan tinjauan literatur tentang pengungkapan sukarela dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya, kerangka penelitian berdasarkan *attribution*

theory dan teori agensi dikembangkan. Secara khusus, tingkat pengungkapan IC diharapkan akan dipengaruhi oleh kualitas mekanisme tata kelola perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berkembangnya fenomena modal intelektual di Indonesia diawali dari munculnya peraturan tentang aset tak berwujud (PSAK No. 19). Namun, secara eksplisit penjelasan mengenai modal intelektual belum diatur didalam standar akuntansi keuangan ini (Pradita & Solikhah, 2017). Petty dan Cuganesan (2005) menyatakan bahwa informasi ini dilaporkan secara sukarela oleh perusahaan, untuk lebih baik menangani kebutuhan informasi pemangku kepentingan.

Dalam hal ini, penelitian ini menelusuri peran mekanisme tata kelola perusahaan pada pengungkapan IC dalam perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Memahami faktor-faktor seperti karakteristik dewan komisaris dan struktur kepemilikan pada pengungkapan IC dapat memungkinkan untuk menilai efektivitas dan peluang mereka untuk peningkatan perusahaan. Penelitian ini dimulai dengan tinjauan literatur tentang pengungkapan sukarela dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya, kerangka penelitian dikembangkan berdasarkan teori agensi. Secara khusus, tingkat pengungkapan IC diharapkan akan dipengaruhi oleh kualitas mekanisme tata kelola perusahaan. Berdasarkan alasan dan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan yaitu:

1. Apakah ada pengaruh positif antara ukuran dewan komisaris dan tingkat pengungkapan IC?



2. Apakah ada pengaruh positif antara kepemilikan *blockholder* dan tingkat pengungkapan IC?
3. Apakah ada pengaruh positif antara kepemilikan pemerintah dan tingkat pengungkapan IC?
4. Apakah ada pengaruh positif antara ukuran masa jabatan dewan komisaris komisaris dan tingkat pengungkapan IC?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari mekanisme tata kelola perusahaan pada tingkat pengungkapan modal intelektual (ICD) di perusahaan bank yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh dari mekanisme tata kelola perusahaan pada tingkat pengungkapan IC di Indonesia
2. Penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman mengenai teori dari pelaporan IC dan hubungan antara pengungkapan IC dan mekanisme tata kelola perusahaan
3. Penelitian ini menjadi penelitian pertama yang memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh masa jabatan dewan komisaris komisaris terhadap pengungkapan IC perusahaan yang terkait di Indonesia
4. Penelitian ini dapat hasil dapat digunakan sebagai pedoman yang berguna untuk regulator, manajemen perusahaan, dan pemegang saham.



5. Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan atas sumber pustaka acuan, rujukan, atau referensi bagi penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori yang menjadi landasan pemikiran peneliti serta hasil penelitian terdahulu yang sejenis, yang kemudian disusun menjadi sebuah kerangka pemikiran, dan mengajukan hipotesis sesuai konsep dari penelitian sebelumnya.

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Attribution Theory

Dalam *attribution theory* perusahaan melakukan pengungkapan didorong oleh harapan perusahaan atas antisipasi para pengguna laporan keuangan dan tingkat *managerial overconfidence* yang tinggi (Brennan dan Merkl-Davies, 2011). Dalam teori ini perusahaan, sebagai pihak yang menyajikan laporan keuangan, biasanya cenderung menyalahkan faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan atas kegagalan atau hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada perusahaan. Sebaliknya, perusahaan cenderung akan menjunjung tinggi faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan atas keberhasilan dan pencapaian tujuan yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Brennan dan Merkl-Davies (2011) *attribution theory* menjelaskan perusahaan sebagai pihak yang menyajikan laporan keuangan, secara sengaja mengungkapkan informasi dalam laporan keuangannya dengan tujuan untuk mencegah efek negatif dari sebuah informasi. Selain itu teori ini juga menyatakan tujuan lain dari pengungkapan informasi yang dilakukan adalah menghindari persepsi yang kurang baik dari para pengguna laporan keuangan.



2.1.2. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal* (s)) melibatkan orang lain (*agent*) untuk mengerjakan beberapa layanan atas nama mereka, termasuk mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Menurut teori agensi, hubungan *principal* dan agen harus menggunakan informasi dalam organisasi secara efisien untuk meminimalkan asimetri informasi dan biaya berbasis risiko (Eisenhardt, 1989). Di dalam teori agensi pula, biaya agensi muncul berkaitan dengan asimetri informasi yang terjadi di antara pemilik saham dan manajer, atau antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas.

Meningkatkan pengungkapan perusahaan dipandang sebagai salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer, yang lebih cenderung memiliki pengetahuan rinci tentang kegiatan operasional perusahaan, memberikan informasi tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi kepada para pemegang saham dan kelompok pengguna lainnya (Cooke, 1989). Informasi lain yang diungkapkan dianggap sukarela karena peraturan pelaporan keuangan umumnya mengajukan persyaratan pengungkapan minimum. Pengungkapan sukarela adalah kebijaksanaan manajer, dan sebagaimana dikemukakan oleh Verrecchia (1983), manajer akan mengungkapkan informasi sukarela ketika manfaat lebih besar daripada biaya terkait.

2.1.3. Pengungkapan IC

James Guthrie dan Petty (2000) menyatakan bahwa modal intelektual adalah sumber daya yang penting dalam menentukan kekuatan dari nilai perusahaan dan kinerja dari ekonomi nasional. Komponen modal intelektual terdiri dari: (a) *Human*



Capital adalah kemampuan dan karakteristik karyawan perusahaan seperti energi, kecerdasan, sikap, komitmen, kreatifitas, kemampuan belajar dan sebagainya, termasuk *knowledge* dan berbagai *skill* yang dimiliki oleh karyawan yang dapat berkontribusi untuk penciptaan nilai tambah perusahaan. (b) *Internal Capital* atau *organizational capital* adalah *knowledge* yang dimiliki perusahaan untuk ditransformasikan oleh *Human Capital* sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Termasuk dalam komponen ini adalah sistem informasi, teknologi, struktur dan sistem distribusi, sistem produksi dan sebagainya. (c) *External Capital* atau *relational capital* adalah kemampuan perusahaan untuk berinteraksi dengan pihak luar, seperti *customer*, *supplier* dan pihak-pihak lain sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Termasuk dalam komponen ini adalah hubungan baik dengan *customer*, dan *supplier*, *franchise* dan sebagainya (Pulic, 1998). Fenomena IC di Indonesia mulai berkembang ketika peraturan tentang aktiva tidak berwujud yang tertuang di dalam PSAK No. 19 (revisi 2000) muncul (Soraya, 2013). Menurut PSAK No. 19, aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau tujuan administratif. Kemudian, muncul Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-431/BL/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Dalam peraturan tersebut, perusahaan wajib menyampaikan laporan tahunan yang memuat salah satunya tentang tata kelola perusahaan. Pengungkapan IC dalam laporan tahunan sebagian besar bersifat sukarela, karena banyak aspek telah gagal dalam memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam laporan keuangan, atau tidak diukur dalam istilah



keuangan (Whiting & Miller, 2008). Lebih lanjut lagi, Petty dan Cuganesan (2005) menyatakan bahwa informasi mengenai IC dilaporkan secara sukarela oleh perusahaan, untuk menangani kebutuhan informasi pemangku kepentingan dengan lebih baik. Secara lebih jelas klarifikasi ketiga elemen IC tersebut akan dipaparkan di sub berikut.

2.1.3.1. Human Capital

Human Capital merupakan inti dalam modal intelektual, sumber inovasi dan pengembangan, meliputi sumber daya manusia dan mencakup beberapa hal seperti pendidikan, pengetahuan dan kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan, dan karakteristik lainnya yang dimasukkan dalam elemen “karyawan” (Erdianthy, 2013). Menurut Vergauwen (2007) HC terdiri dari pengetahuan dan kompetensi karyawan dan dapat lebih didekomposisi menjadi individu. HC individu mengacu kepada kompetensi tersirat individu dari warisan genetik, pendidikan, keterampilan, pelatihan, pengalaman dan nilai-nilai dan keyakinan. Dalam hal ini HC lebih mengarah terhadap SDM perusahaan. Penyebutan *Human Capital* untuk sumber daya manusia (SDM) sepertinya belum banyak dianut oleh pelaku bisnis, sementara peran SDM terhadap masa depan perusahaan sangat menentukan (Endri 2012). Di dalam sebuah negara ketika sumber daya manusia tinggi maka akan dapat mengangkat peradaban di negara tersebut. Negara yang terbelakang tetap pada posisinya karena sumber daya manusia yang rendah sedangkan negara yang maju bertambah kuat, karena sumber daya manusia yang makin kuat (Qomar, 2006). Elkin (1998) mengatakan teori *Human Capital* menunjukkan bahwa modal manusia dari



suatu bangsa atau organisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan ekonomi.

Hal tersebut tidak terkecuali dengan sumber daya manusia di dalam perusahaan.

SDM adalah modal yang dapat terus berkembang seiring dengan waktu dan dinamika lingkungan bisnis serta kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Banyak para

pemimpin perusahaan kurang menyadari bahwa sebenarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan berasal dari *Human Capital*, hal tersebut karena aktivitas perusahaan hanya dilihat dari perspektif bisnis semata dimana perhatian utama

manajemen lebih ke modal, teknologi dan uang (Endri 2012). Frederick W. Smith

atau lebih banyak dikenal dengan nama FedEx pemilik perusahaan transportasi (pengiriman) terbesar di dunia yang didirikan 50 tahun lampau, percaya bahwa

mengelola manusia (SDM) merupakan syarat mutlak untuk memenangkan

persaingan. Manusia adalah roh perusahaan. Semua denyut jantung bernama oprasional dan aliran darah yang tak lain adalah uang (cash flow) tidak akan berarti

manakalah ditubuh perusahaan tersebut kehilangan rohnya (Agung 2007).

2.1.3.2. Structural capital

Menurut D Erdianthy (2013) *Structural capital* atau modal internal merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan

dan strukturnya, yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan yang mencakup dua

elemen penting, yaitu intellectual property dan infrastructure asset. Elemen pertama,

intellectual property dilindungi oleh hukum (paten, hak cipta, dan merk dagang).



Sedangkan elemen kedua adalah *infrastructure asset*, merupakan elemen modal intelektual yang dapat diciptakan di dalam perusahaan atau dimiliki dari luar (budaya perusahaan, *management process*, sistem informasi, *networking system*), SC sering disebut sebagai "modal organisasi", yaitu internal infrastruktur perusahaan. Bagian dari IC terdiri sistem, proses, prosedur, paten, konsep, dll dan tidak hanya dibuat oleh karyawan atau dibawa dari sumber eksternal, tetapi juga tertanam ke perusahaan (Vergauwen, 2007). *Structural capital* yang baik bagi perusahaan akan berdampak baik bukan hanya pada kinerja tapi juga kekuatan saing perusahaan. paten, dan hak cipta serta perihal yang seperti citra organisasi, sistem informasi, dan hak milik basis data. Karenanya modal struktural bisa diklasifikasikan lebih jauh lagi menjadi modal inovasi, proses, dan organisasi. Dari pemaparan tersebut maka kekuatan saing perusahaan sebagian besar berada pada *structural capitalnya*.

2.1.3.3. Relational Capital

Capital Relational atau modal eksternal merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata. *Relational capital* merupakan hubungan yang harmonis/*association network* yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. *Relational capital* dapat muncul dari berbagai bagian diluar lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut.

(suwarjono, 2003). Menurut Vergauwen (2007) RC sering disebut sebagai modal "eksternal" atau "reputasi", yang terdiri dari reputasi perusahaan, merek, dan hubungannya dengan klien, pemasok dan stakeholder lainnya.

2.1.4. Penelitian Terdahulu

Pengungkapan IC dalam laporan tahunan sebagian besar bersifat sukarela, karena banyak aspek telah gagal dalam memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam laporan keuangan, atau tidak diukur dalam istilah keuangan (Whiting & Miller, 2008). Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB, 2001) menggambarkan pengungkapan sukarela sebagai informasi yang utamanya di luar laporan keuangan yang tidak secara eksplisit diperlukan oleh aturan atau standar akuntansi. Definisi serupa disediakan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB). Meek *et al.* (1995) mendefinisikan pengungkapan sukarela sebagai pengungkapan yang melebihi persyaratan, mewakili pilihan bebas pada bagian dari manajemen perusahaan untuk menyediakan informasi akuntansi dan informasi lain yang dianggap relevan dengan kebutuhan keputusan pengguna laporan tahunan perusahaan.

Peran penting dalam efisiensi pasar modal berarti bahwa pengungkapan sukarela dan faktor penentunya merupakan topik penting yang telah menarik perhatian para peneliti teoritis dan empiris sejak 1960-an. Dua aliran penelitian dapat dibedakan: (i) pengaruh karakteristik perusahaan (seperti usia, profitabilitas, daftar, ukuran, pertumbuhan, dan *leverage*) pada pengungkapan IC; dan (ii) pengaruh struktur tata kelola perusahaan termasuk karakteristik dewan dan konsentrasi kepemilikan (Huafang & Jianguo, 2007).



Berhubungan dengan hal yang pertama, bukti empiris telah menemukan hubungan positif yang jelas (ukuran, daftar asing, internasionalitas) dan hubungan campuran (*leverage*, ukuran perusahaan audit, profitabilitas) antara karakteristik perusahaan dan pengungkapan IC (Bozzolan *et al.*, 2006). Misalnya, dalam memeriksa faktor-faktor penentu keputusan untuk mengungkapkan informasi IC dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar secara publik di Australia, Brügggen *et al.* (2009) menemukan bahwa klasifikasi industri dan ukuran perusahaan memainkan peran kunci. Demikian pula, Anam Ousama *et al.* (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan klasifikasi industri merupakan penentu utama dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Malaysia. White *et al.* (2007), di Australia, dan Oliveira *et al.* (2006), di Portugal, mendokumentasikan pengaruh usia perusahaan, tingkat *leverage*, jenis auditor, status daftar, klasifikasi industri, dan ukuran perusahaan pada pengungkapan IC. Seperti White *et al.* (2007), Whiting dan Woodcock (2011) menganalisis sampel perusahaan Australia dan menemukan bahwa pengungkapan IC lebih luas pada mereka yang beroperasi di industri teknologi tinggi atau pengetahuan intensif, dan mereka yang diaudit oleh perusahaan *Big Four*. Di Spanyol, Alcaniz *et al.* (2015) menganalisis pengungkapan IC yang disediakan dalam prospektus *Initial Public Offering* (IPO) dan karakteristik perusahaan. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar menyediakan lebih banyak informasi IC, perusahaan teknologi tinggi, dan perusahaan-perusahaan di mana pemegang saham yang ada tidak mempertahankan kepemilikan mayoritas mereka mengikuti IPO.

Hal kedua dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan pada pengungkapan IC. Secara umum, literatur menemukan

bahwa ada perbedaan antara perusahaan, dan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan adalah penentu utama dari perbedaan ini (Kearns *et al.*, 2014). Beberapa studi empiris telah mengeksplorasi hubungan tersebut. Misalnya, berdasarkan sampel perusahaan yang terdaftar di Malaysia, (Ahmed Haji & Mohd Ghazali, 2013) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris komisaris, komisaris independen, efektivitas dewan komisaris dan posisi ketua memainkan peran positif dan signifikan dalam menjelaskan tingkat dan kualitas pengungkapan IC. Selain itu, mereka menemukan hubungan negatif dengan kepemilikan direktur, dan hubungan positif dengan kepemilikan pemerintah. Lebih jauh lagi, mereka menyoroti efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dalam mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi IC dan oleh karena itu pengungkapan dilakukan. Demikian pula, Jing Li *et al.* (2008) menganalisis sampel perusahaan di Inggris dan menemukan bahwa komposisi dewan, struktur kepemilikan, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit memainkan peran penting dalam pengungkapan IC.

Abeysekera (2010) meneliti pengaruh ukuran dewan komisaris pada pengungkapan IC dalam sampel perusahaan yang terdaftar di Kenya, dan menemukan bahwa IC yang lebih luas pengungkapan dikaitkan dengan dewan yang lebih besar. Menggunakan sampel dari Australia, White *et al.* (2007) dengan jelas menggarisbawahi bahwa pengungkapan IC didorong oleh teori agensi tradisional, dan isu-isu tata kelola perusahaan kontemporer. Mereka mengamati hubungan positif yang kuat antara pengungkapan IC dan independensi dewan. Berfokus pada efektivitas dewan, Cerbioni dan Parbonetti (2007) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam pengungkapan IC dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Eropa. Mereka mendokumentasikan bahwa



ukuran dewan komisaris, struktur, dan kepemimpinan berhubungan negatif dengan pengungkapan IC, sementara proporsi direktur independen berhubungan positif.

Sebaliknya, Rodrigues *et al.* (2016) mengamati bahwa pengungkapan IC meningkat seiring dengan peningkatan ukuran dewan komisaris, tetapi cenderung menurun seiring dengan peningkatan dualitas CEO dan proporsi yang lebih tinggi dari direktur independen di dalam sampel Portugis mereka.

Begitu juga dalam hal yang terjadi di Portugal, Oliveira *et al.* (2006) menunjukkan secara empiris bahwa perusahaan dengan konsentrasi pemegang saham yang lebih rendah cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi IC. Mereka menjelaskan temuan ini dengan mencatat bahwa biaya agensi meningkat karena struktur kepemilikan menjadi lebih menyebar karena kemungkinan meningkatnya konflik kepentingan. Ini memotivasi perusahaan-perusahaan tersebut untuk secara sukarela mengungkapkan informasi untuk mengurangi biaya. Hidalgo *et al.* (2010) mengkonfirmasi temuan ini. Berdasarkan sampel dari Meksiko, mereka secara empiris mendokumentasikan hubungan negatif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan IC, mendukung hipotesis yang diajukan. Dalam hal yang terjadi di Singapura, Firer dan Williams (2015) mengamati bahwa perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang lebih tinggi, perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan direktur eksekutif yang tinggi, dan perusahaan dengan tingkat kepemilikan pemerintah yang rendah kurang termotivasi untuk mengungkapkan informasi IC daripada rekan-rekan mereka.

Kesimpulannya, literatur tentang faktor penentu pengungkapan IC mendokumentasikan variasi yang signifikan dalam kuantitas dan kualitas pengungkapan di berbagai negara dan di antara perusahaan. Studi menunjukkan

bahwa variasi ini dapat dijelaskan oleh karakteristik perusahaan seperti industri, internasionalisasi perusahaan, daftar asing, *leverage*, ukuran, profitabilitas, dan kualitas dan ketelitian audit. Aliran kedua penelitian menjelaskan variasi dalam pengungkapan IC dalam hal mekanisme tata kelola perusahaan seperti karakteristik dewan direksi dan struktur kepemilikan. Mengingat bahwa penelitian ini menyelidiki pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan pada pengungkapan IC di Indonesia, penelitian ini berkontribusi pada kategori yang terakhir. Ringkasan penelitian terdahulu akan dijelaskan di dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
1	Saverio Bozzolan, Philip O'Regan, dan Federica Ricceri (2006)	<i>Modal intelektual disclosure (ICD), A comparison of Italy and the UK</i>	Variabel dependen: Tingkat pengungkapan modal intelektual Variabel Independen: Tipe Industri, negara	Menunjukkan bahwa tipe industri berhubungan signifikan hanya dengan dimensi <i>external capital</i> tetapi tidak dengan dimensi <i>internal</i> atau <i>Human Capital</i> . Akan tetapi menolak hipotesis bahwa perusahaan di UK lebih banyak mengungkapkan informasi dibanding perusahaan di



6 Ruth L. Hidalgo, Emma Garcia-Meca, dan Isabel Martinez (2011)

Corporate Governance and Modal intelektual Disclosure

Variabel Dependen: Pengungkapan aset tak berwujud

Adanya hubungan positif dan signifikan dalam hubungan antara

Variabel independen: Ukuran dewan komisaris, independensi dewan, komite audit independen, dualitas CEO, kepemilikan internal, kepemilikan keluarga, konsentrasi kepemilikan, dan kepemilikan institusional

ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan aset tak berwujud sukarela. Dan adanya hubungan negatif dan signifikan antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan aset tak berwujud sukarela.

7 Jing Li, Richard Pike, dan Roszaini Haniffa (2008)

Modal intelektual Disclosure and Corporate Governance Structure in UK Firms

Variabel Dependen: Pengungkapan IC

Adanya hubungan yang positif dan signifikan antara proporsi direktur

Variabel Independen: Proporsi direktur non eksekutif independen, dualitas CEO, kepemilikan saham terkonsentrasi, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit.

non eksekutif independen, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan IC. Sedangkan hubungan yang negatif dan signifikan ditunjukkan pada konsentrasi kepemilikan saham dan negatif dan tidak signifikan pada dualitas CEO terhadap pengungkapan IC.



- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 8 | Lidia Oliveira Lúcia Lima Rodrigues Russell Craig (2006) | <i>Firm-specific determinants of intangibles reporting: evidence from the Portuguese stock market</i> | <p>Variabel Dependen: Pengungkapan sukarela aset tak berwujud</p> <p>Variabel Independen: Ukuran perusahaan, leverage, konsentrasi kepemilikan, perusahaan audit Big 4, profitabilitas, tipe industri, perusahaan yang terdaftar di bursa, dan internasionalisasi perusahaan</p> | <p>Ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, perusahaan audit Big 4, dan tipe industri berhubungan positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela aset tak berwujud. Sedangkan leverage, profitabilitas, perusahaan yang terdaftar di bursa, dan aktivitas asing tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan.</p> |
| 9 | Gregory White, Alina Lee dan Greg Tower (2007) | <i>Drivers of voluntary modal intelektual disclosure in listed biotechnology companies</i> | <p>Variabel Dependen: Pengungkapan sukarela IC</p> <p>Variabel Independen: Ukuran perusahaan, proporsi kepemilikan, independensi dewan, dan umur perusahaan, dan leverage.</p> | <p>Adanya korelasi positif yang kuat antara tingkat pengungkapan modal intelektual sukarela dan independensi dewan, usia perusahaan, ukuran perusahaan dan tingkat leverage. Tidak ada korelasi antara praktik pengungkapan dan tingkat konsentrasi kepemilikan, yang menunjukkan bahwa pemegang saham</p> |



10. Lilik Handajani, Bambang Subroto, Sutrisno, dan Erwin Saraswati
- Board Diversity Matter on Corporate Social Disclosure? An Indonesian Evidence*

institusional tidak boleh melobi manajemen dan dewan untuk akuntabilitas yang lebih besar.

Variabel Dependen: Umur dan ukuran Pengungkapan sosial perusahaan dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Sementara jenis kelamin perempuan di dalam keanggotaan dan masa jabatan dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Serta proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial perusahaan.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam sub-bab kerangka pemikiran ini, hubungan antar variabel di dalam penelitian ini akan dibahas dan digambarkan secara singkat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai hubungan antara ukuran dewan komisaris, kepemilikan

blockholder, kepemilikan pemerintah, dan ukuran komite audit dengan pengungkapan IC.

Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya yaitu terdapat inkonsistensi mengenai hubungan antara pengungkapan IC dan ukuran dewan komisaris. Abeysekera (2010) di Kenya, Rodrigues *et al.* (2016), di Portugal, dan Ahmed Haji dan Mohd Ghazali (2013), di Malaysia, menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Sedangkan Cerbioni dan Parbonetti (2007), menggunakan sampel perusahaan Eropa, menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan negatif dengan tingkat pengungkapan IC sukarela secara keseluruhan. Hidalgo *et al.* (2010) di Meksiko menunjukkan hasil yang inkonsisten ketika ada peningkatan hingga 15 dewan direksi akan menunjukkan hasil yang positif. Sedangkan ketika ada peningkatan hingga lebih dari 15 dewan direksi justru menunjukkan hasil yang negatif terhadap hubungannya dengan pengungkapan IC.

Studi empiris menunjukkan hasil yang beragam untuk proporsi direktur eksternal. Cerbioni dan Parbonetti (2007) di Eropa, Jing Li *et al.* (2008) di Inggris, Ahmed Haji dan Mohd Ghazali (2013) di Malaysia, dan Abeysekera (2010) di Kenya menunjukkan hubungan yang positif antara proporsi direktur eksternal, yang mana menurut Peraturan OJK No. 33 Pasal 20 disebut komisaris independen di Indonesia, berhubungan positif dan signifikan dengan pengungkapan IC. Sedangkan Rodrigues *et al.* (2016) di Portugal dan Abdul Rashid *et al.* (2012) di Malaysia menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara direktur eksternal dan pengungkapan IC. Hidalgo *et al.* (2010) menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara direktur eksternal dan pengungkapan IC di Meksiko.

Dalam hubungannya dengan kepemilikan *blockholder*, hasil studi empiris menunjukkan hubungan yang tidak dapat disimpulkan. Gan *et al.* (2013) di Malaysia menunjukkan hubungan yang positif antara blokir dengan pengungkapan IC. Sedangkan Oliveira *et al.* (2006) menunjukkan hubungan yang negatif antara blokir dan pengungkapan IC pada sampel di Portugal. Sedangkan White *et al.* (2007) mengamati tidak ada korelasi yang signifikan antara blokir dengan pengungkapan IC di Australia.

Sementara itu, belum diperiksa secara rinci mengenai hubungan antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan IC secara empiris. Pada umumnya, penelitian menunjukkan hubungan yang positif. Secara khusus, Firer dan Williams (2015) di Singapura, dan Gan *et al.* (2013) dan Ahmed Haji dan Mohd Ghazali (2013) di Malaysia, mengamati hubungan positif dan signifikan antara proporsi kepemilikan pemerintah dan pengungkapan IC. Sebaliknya Huafang dan Jianguo (2007) dan Mak dan Li (2001) berpendapat bahwa pemerintah cenderung kurang aktif dalam memantau investasi perusahaan, sehingga akuntabilitas dan pemantauan yang buruk cenderung melemahkan tekanan untuk pengungkapan sukarela.

Penelitian sebelumnya tentang masa jabatan dewan komisaris memiliki jumlah yang terbatas dan memberikan bukti yang kontradiktif mengenai dampak masa jabatan pada dewan yang ada di perusahaan. Dewan dengan jangka waktu yang panjang akan memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang perusahaan dan perubahan lingkungan bisnisnya (Vafeas, 2003). Sebaliknya hubungan dekat dengan manajemen akan membuat dewan kurang efektif dalam memantau perilaku manajemen. Dewan dengan masa jabatan yang panjang memiliki konsekuensi negatif bagi tata kelola, karena kurangnya pengawasan yang efektif terhadap

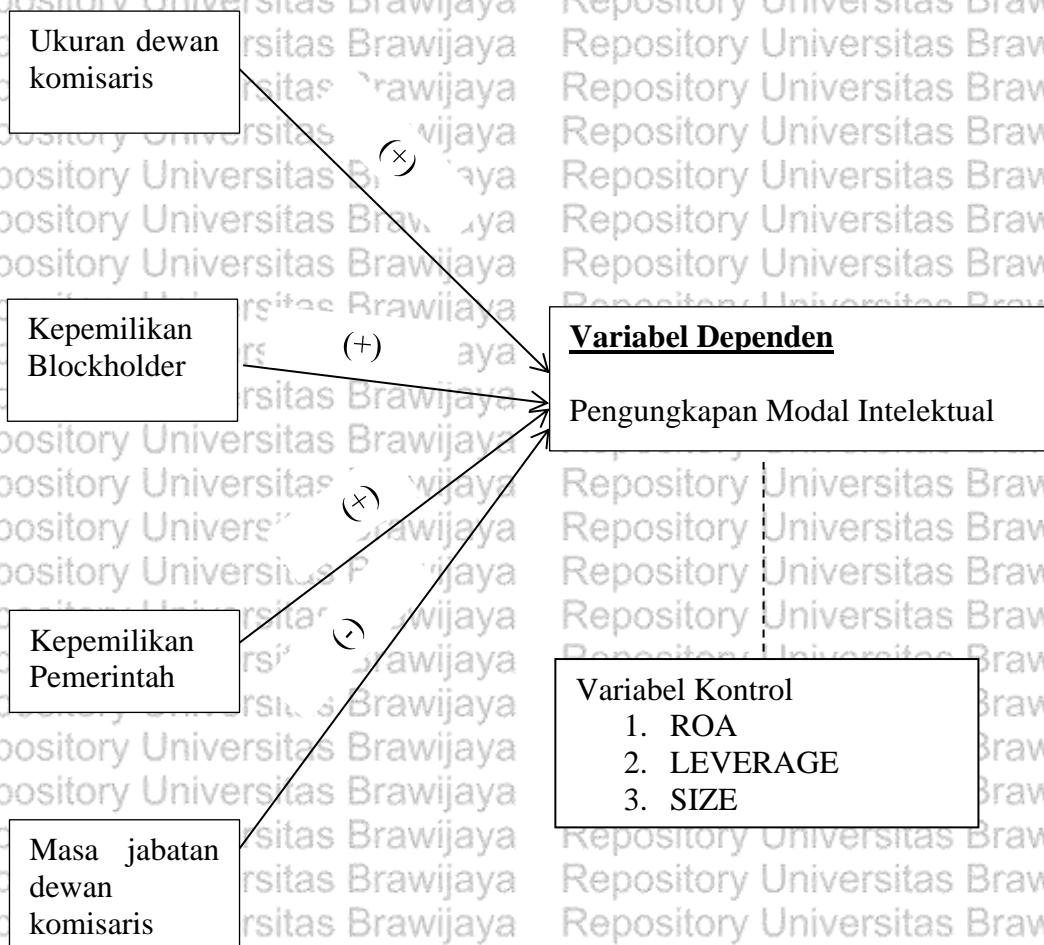
eksekutif (Berberich & Niu, 2011). Byrd *et al.* (2010) menjelaskan bahwa hubungan jangka panjang antara dewan direksi dan eksekutif akan meningkatkan masalah keagenan dan menurunkan fungsi pengawasan dewan terhadap eksekutif.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini akan diilustrasikan pada gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

Variabel Independen





2.3. Pengembangan Hipotesis

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai konsep dan teori yang mendasari mengenai pengembangan hipotesis yang diajukan. Terdapat lima hipotesis yang akan di bahas di bagian ini.

2.3.1. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris mengukur jumlah anggota dewan komisaris secara keseluruhan. Menurut tugas dan wewenangnya yang tertera di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 Tahun 2014, dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan publik maupun usaha emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi. Fama dan Jensen (1983) berpendapat bahwa jumlah ini dapat mempengaruhi bagaimana para direktur menjalankan tanggung jawab mereka.

Dari perspektif teori agensi, dapat dikatakan bahwa dewan yang lebih besar lebih mungkin untuk mendeteksi masalah keagenan, hanya karena dewan tersebut menawarkan keahlian yang lebih besar, pengawasan manajemen dan akses ke sumber daya yang lebih luas. Selain itu, jumlah direktur yang lebih besar mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi karena ada lebih banyak orang untuk melaksanakan pekerjaan (Fauzi, 2012). He *et al.* (2009) berpendapat bahwa menambahkan lebih banyak anggota ke dewan memberikan informasi dan sumber daya yang berpotensi memiliki manfaat. Jadi, dewan yang lebih besar secara langsung meningkatkan daya saing perusahaan dan meningkatkan lingkungan perusahaan. Sebaliknya, lebih sedikit studi yang menganjurkan untuk dewan yang

lebih kecil. Salah satu contoh adalah Jensen (1993), yang berpendapat bahwa dewan yang lebih besar itu kurang efektif karena koordinasinya yang lebih kompleks ketika memiliki lebih banyak direktur yang memanfaatkannya untuk menguasai keuntungan yang diperoleh. Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa dewan yang lebih kecil dapat berkinerja lebih baik, karena ketika ada lebih dari tujuh atau delapan anggota mereka cenderung berkoordinasi dan berkomunikasi secara efektif, dan lebih sulit untuk CEO untuk mengendalikan.

Bukti empiris menunjukkan hasil yang inkonsisten mengenai hubungan antara pengungkapan IC dan ukuran dewan komisaris. Misalnya, Abeysekera (2010) menguji pengaruh ukuran dewan komisaris pada pengungkapan IC di perusahaan yang terdaftar di Kenya dan mengungkapkan hubungan positif dengan ukuran dewan komisaris. Demikian pula, Rodrigues *et al.* (2016), di Portugal, dan Ahmed Haji dan Mohd Ghazali (2013), di Malaysia, mengamati hubungan yang positif dan signifikan. Sebaliknya, Cerbioni dan Parbonetti (2007), menggunakan sampel perusahaan Eropa, menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan negatif dengan tingkat pengungkapan IC sukarela secara keseluruhan, tetapi secara positif terkait dengan dua elemen spesifik IC, yaitu modal eksternal dan manusia.

Menariknya, Hidalgo *et al.* (2010) mengamati bahwa peningkatan hingga 15 direktur dalam sampel dewan Meksiko memiliki efek menguntungkan pada pengungkapan IC. Namun, mereka mencatat bahwa jumlah ini melebihi 15, efeknya terbalik karena kapasitas untuk pengawasan dan kontrol dalam proses pengambilan keputusan menurun. Akhirnya, Rodrigues *et al.* (2016) menyoroti perlunya kehati-hatian dalam meyakini bahwa menambahkan direksi tambahan ke dewan yang ada selalu meningkatkan pengungkapan IC.

Di Indonesia, Pasal 20 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 tahun

2014 menyatakan bahwa dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 orang anggota

dewan komisaris, dan 1 orang anggota di antaranya adalah komisaris independen.

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris yang lebih besar diharapkan terkait

dengan pengungkapan IC yang lebih tinggi, mengingat bahwa lebih banyak jumlah

anggota dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitasnya. Akibatnya, penelitian

ini berhipotesis bahwa:

H1. Ada pengaruh positif antara ukuran dewan komisaris dan pengungkapan

IC, *ceteris paribus*

2.3.2. Kepemilikan *Blockholder*

Kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976),

berdasarkan teori agensi dan struktur kepemilikan, memainkan peran sentral dalam

literatur *corporate governance*. Bonazzi dan Islam (2007) berpendapat bahwa

mekanisme kontrol yang efektif yang dapat mengurangi biaya agensi dan memaksa

manajer bertindak demi kepentingan pemegang saham telah menjadi perhatian

utama bagi tata kelola perusahaan. Demikian pula, Jensen (1993) berpendapat

bahwa struktur kepemilikan merupakan elemen penting dalam pengendalian dan tata

kelola perusahaan. Teori keuangan telah lama mengakui peran penting dari ukuran

pemegang saham dalam tata kelola perusahaan (Dhillon & Rossetto, 2009).

Sumber daya dan keahlian mereka memiliki artian bahwa pemilik blok

saham yang besar memiliki dorongan lebih besar untuk memantau dan

mendisiplinkan manajer untuk mengatasi masalah kebebasan dalam bertindak yang

dihasilkan dari kepemilikan yang tersebar (Shleifer & Vishny, 1986). Edmans

(2014) mengklaim bahwa pemegang saham besar, yang juga dikenal sebagai



blockholders, memainkan peran penting dalam tata kelola, karena ukuran saham mereka di perusahaan memberikan dorongan untuk menanggung biaya manajer pemantauan. Demikian pula, Dou *et al.* (2016) menyatakan bahwa ketika pemegang saham tidak memiliki kepentingan mayoritas (yaitu kepemilikan yang tersebar luas), hal itu kurang ekonomis bagi pemegang saham individu untuk mengeluarkan biaya pemantauan yang signifikan, karena mereka hanya akan menerima manfaat yang kecil. Dengan demikian, *blockholder* dapat membantu meningkatkan kualitas pelaporan dan transparansi. White *et al.* (2007) berpendapat bahwa konsentrasi kepemilikan yang rendah dapat disamakan dengan pengendalian manajerial, sedangkan yang sebaliknya dapat disamakan dengan pengendalian pemilik. Atau, Li *et al.* (2008) berpendapat bahwa *blockholder* memberikan pemantauan yang efektif dan mengurangi asimetri informasi, karena mereka biasanya dapat mengakses informasi perusahaan yang mereka butuhkan.

Hasil studi empiris tentang pengaruh kepemilikan *blockholder* pada pengungkapan IC tidak dapat disimpulkan. Misalnya, Gan *et al.* (2013) mengamati hubungan positif di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Malaysia. Sebaliknya, Oliveira *et al.* (2006) menunjukkan bahwa blokir memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pelaporan sukarela IC di perusahaan yang terdaftar di Portugal. Dalam memeriksa pengungkapan IC sukarela di perusahaan yang terdaftar di Australia, White *et al.* (2007) mengamati tidak ada korelasi yang signifikan antara praktik pengungkapan dan tingkat kepemilikan *blockholder*.

Di Indonesia, Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 tahun 2017 mewajibkan anggota direksi atau anggota dewan komisaris untuk melaporkan kepada OJK atas kepemilikan paling sedikit 5% dari modal disetor dalam

perusahaan terbuka. Mengingat efektivitas dari *blockholder* sebagai alat tata kelola perusahaan, dan kemampuan mereka untuk memberikan tekanan pada manajer untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan praktik pengungkapan, diharapkan bahwa proporsi kepemilikan *blockholder* yang lebih tinggi dikaitkan dengan pengungkapan IC yang lebih besar. Pada akhirnya, penelitian ini berhipotesis bahwa:

H2. Ada pengaruh positif antara kepemilikan *blockholder* dan tingkat pengungkapan IC, *ceteris paribus*

2.3.3. Kepemilikan Pemerintah

Eng dan Mak (2003) mendefinisikan kepemilikan pemerintah sebagai proporsi saham yang dimiliki oleh pemerintah dan lembaga yang terkait dengan pemerintah. Firer dan Williams (2015) berpendapat bahwa kepemilikan pemerintah dapat secara signifikan mempengaruhi praktik pengungkapan, termasuk yang terkait dengan IC. Mereka mengklaim bahwa direktur perusahaan dengan kepemilikan pemerintah lebih fokus pada kebijakan (seperti pengembangan sumber daya manusia dan IC) yang bermanfaat bagi kesejahteraan negara secara keseluruhan. Para direktur ini menggunakan pengungkapan sukarela untuk memberi sinyal kepada pihak berwenang dan masyarakat pada umumnya bahwa mereka telah menerapkan kebijakan pemerintah di bidang-bidang ini. Di satu sisi, Eng dan Mak (2003) berpendapat bahwa kepemilikan pemerintah meningkatkan *moral hazard* dan masalah keagenan. Didasarkan dari teori *grabbing hand*, BUMN akan mendapatkan keuntungan dengan adanya kepemilikan pemerintah melalui perlakuan khusus seperti regulasi yang dipermudah, bailouts, akses yang dipermudah untuk mendapatkan sumber daya, persyaratan pinjaman dan perdagangan yang



menguntungkan, sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Sebaliknya, kepemilikan pemerintah dapat merugikan BUMN karena adanya keterlibatan dalam korupsi, *enrichment*, *expropriation*, dan *rent-seeking behavior* yang menyebabkan turunnya kinerja perusahaan BUMN.

Di sisi lain, Mak & Li (2001) berpendapat bahwa pemerintah dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber dan cenderung kurang aktif dalam memantau investasi mereka di perusahaan yang terdaftar. Perusahaan-perusahaan ini kurang cenderung mengadopsi mekanisme tata kelola yang kuat karena mereka kurang akuntabel, pemantauan kinerja keuangan mereka lebih lemah, dan mereka memiliki akses lebih mudah ke pembiayaan. Secara empiris, hubungan antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan IC belum diperiksa secara rinci.

Umumnya, temuan menunjukkan hubungan yang positif. Secara khusus, Firer dan Williams (2015) di Singapura, Gan *et al.* (2013) dan Ahmed Haji dan Mohd Ghazali (2013) di Malaysia, mengamati hubungan positif dan signifikan antara proporsi kepemilikan pemerintah dan pengungkapan IC.

Di Indonesia, kepemilikan pemerintah pada perusahaan yang terdaftar di BEI sangat terbatas, tetapi relatif merupakan perusahaan bekas Badan Usaha Milik Negara yang besar (kapitalisasi pasar besar) dan pada bidang industri yang dianggap strategis, misalnya pada bidang telekomunikasi, perbankan, dan konstruksi (Hadiprajitno, 2013). Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Arifin (2003) menunjukkan kepemilikan pemerintah memiliki masalah keagenan yang lebih sedikit. Oleh karena itu, asimetri informasi dapat dikurangi dan dapat meningkatkan keinginan untuk melakukan pengungkapan IC secara sukarela oleh perusahaan.

Akhirnya, penelitian ini berhipotesis bahwa:



H3: Ada pengaruh positif antara kepemilikan pemerintah dan tingkat pengungkapan IC, *ceteris paribus*

2.3.4. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Studi tentang masa jabatan dewan komisaris memiliki jumlah yang masih terbatas dan memberikan bukti yang kontradiktif mengenai dampak masa jabatan pada dewan yang ada di perusahaan. Byrd *et al.* (2010) menyatakan bahwa hubungan jangka panjang antara dewan komisaris dan direksi akan meningkatkan masalah keagenan dan mengurangi efektivitas fungsi pengawasan ke manajemen. Vafeas (2003) menjelaskan bahwa dewan dengan jangka waktu yang panjang akan memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang perusahaan dan perubahan lingkungan bisnisnya. Di sisi lain, hubungan dekat dengan manajemen akan membuat dewan kurang efektif dalam memantau perilaku manajemen. Berberich dan Niu (2011) menemukan dewan dengan masa jabatan yang panjang memiliki konsekuensi negatif bagi tata kelola, karena kurangnya pengawasan yang efektif terhadap eksekutif. Hubungan jangka panjang antara dewan direksi dan eksekutif akan meningkatkan masalah keagenan dan menurunkan fungsi pengawasan dewan terhadap eksekutif (Byrd *et al.*, 2010).

Argumentasi yang berbeda ditemukan dalam beberapa penelitian bahwa masa jabatan yang panjang akan membuat dewan cenderung lebih kritis daripada dewan dengan masa jabatan yang lebih pendek (Bebchuk & Cohen, 2003). Dewan dengan masa jabatan yang panjang akan meningkatkan frekuensi interaksi dewan dan frekuensi pertukaran informasi dewan yang lebih tinggi (Rutherford & Buchholtz, 2007).

Penelitian yang pernah dilakukan tentang pengaruh masa jabatan dewan komisaris terhadap pengungkapan sosial perusahaan, yang memiliki gejala yang sama dengan pengungkapan IC, menunjukkan hasil bahwa masa jabatan dewan komisaris komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR yang bersifat *voluntary* (Handajani *et al.*, 2014). Penelitian tersebut mendukung dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vafeas (2003) dan Byrd *et al.* (2010). Akhirnya, penelitian ini berhipotesis bahwa:

H4. Ada pengaruh negatif antara masa jabatan dewan komisaris komisaris dan tingkat pengungkapan IC, *ceteris paribus*



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai variabel penelitian, definisi dari masing-masing variabel penelitian, cara mengukur tiap-tiap variabel, sumber dan jenis data penelitian yang akan digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Pada bagian sub bab ini akan dijelaskan mengenai penjelasan masing-masing variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol dari penelitian ini.

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan IC. Whiting dan Miller (2008) melihat kembali studi tentang pengungkapan IC dan determinannya, dan melaporkan bahwa analisis isi dari konten hampir selalu digunakan untuk mengukur tingkatannya. Pendekatan ini melibatkan pengkodean informasi kualitatif dan kuantitatif ke dalam kategori yang telah ditentukan untuk mendapatkan pola dalam penyajian dan pelaporan informasi (J. Guthrie *et al.*, 2004). Teknik ini biasanya mengharuskan manusia untuk mengemas elemen pengungkapan IC yang ditemukan dalam laporan tahunan perusahaan (Lee & Guthrie, 2010), konsisten dengan argumen Abeysekera (2010) bahwa teknik ini adalah sumber utama informasi tentang kegiatan IC perusahaan. Mengikuti kerja empiris sebelumnya (misalnya Bozzolan *et al.*, 2006; Huafang dan Jianguo, 2007;



Brüggen *et al.*, 2009; Abeysekera, 2010; Vafaei *et al.*, 2011; Gamerschlag, 2013; Alcaniz *et al.*, 2015), penelitian ini menggunakan pendekatan yang sama.

Teknik ini dapat diterapkan dalam beberapa cara. Cara-cara tersebut termasuk menghitung kata kunci, kalimat atau bagian, atau membaca seluruh teks (Gamerschlag, 2013). Namun, Li *et al.* (2008) berpendapat bahwa meskipun kata kunci adalah unit pengukuran terkecil, kata kunci tersebut memberikan hal yang paling masuk akal. Demikian pula, Gamerschlag (2013) berpendapat bahwa mengidentifikasi kata kunci yang spesifik pada IC adalah bentuk analisis konten yang paling dapat diandalkan, karena selalu menghasilkan skor yang sama dan dapat dengan mudah ditiru oleh peneliti lain. Setelah pekerjaan sebelumnya (misalnya Vafaei *et al.*, 2011; Gamerschlag *et al.*, 2013), ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah munculnya kata kunci yang ditemukan dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI. Kata kunci didefinisikan menggunakan kerangka kerja yang diusulkan oleh Sveiby (1997) dan dimodifikasi oleh J. Guthrie *et al.* (2004), yang telah digunakan dengan sukses dalam beberapa studi IC (Alfraih, 2018; Branco *et al.*, 2010; Whiting & Miller, 2008). Kerangka kerja ini memiliki tiga kategori dan 24 komponen. Tiga kategori IC adalah: modal internal, eksternal, dan manusia.

Komponen modal intelektual terdiri dari: (a) *Human Capital* adalah kemampuan dan karakteristik karyawan perusahaan seperti energi, kecerdasan, sikap, komitmen, kreatifitas, kemampuan belajar dan sebagainya, termasuk *knowledge* dan berbagai *skill* yang dimiliki oleh karyawan yang dapat dikontribusikan untuk penciptaan nilai tambah perusahaan, (b) *Internal Capital*



atau *organizational capital* adalah *knowledge* yang dimiliki perusahaan untuk di transformasikan oleh *Human Capital* sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Termasuk dalam komponen ini adalah sistem informasi, teknologi, struktur dan sistem distribusi, sistem produksi dan sebagainya. (c) *External Capital* atau *relational capital* adalah kemampuan perusahaan untuk berinteraksi dengan pihak luar, seperti *customer*, *supplier* dan pihak-pihak lain sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Termasuk dalam komponen ini adalah hubungan baik dengan *customer*, dan *supplier*, *franchise* dan sebagainya (Pulic, 1998). Kerangka kerja lengkap ditunjukkan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1****Kerangka Kerja Modal Intelektual**

Modal Internal	Modal Eksternal	Modal Manusia
Hak Kekayaan Intelektual	Merk	Pendidikan
Budaya Perusahaan	Pelanggan	Keterampilan
Paten/Hak Cipta/Merk Dagang	Nama Perusahaan	Kompetensi/Pengetahuan relasi kerja
Sistem Informasi	Kepuasan Pelanggan	Kualifikasi Akademik
Sistem Jaringan	Loyalitas Pelanggan	Kualifikasi Profesional
Proses Manajemen	Jaringan Distribusi	Modal Manusia/Sumber Daya
Filosofi Manajemen	Kolaborasi Bisnis	Semangat Kewirausahaan, Kemampuan Berinovasi, Proaktif dan Reaktif, Kemampuan untuk Berubah
Hubungan Finansial	Perjanjian Lisensi	Pelatihan SDM

Untuk mengukur tingkat pengungkapan IC, studi empiris sebelumnya (misalnya Guthrie & Petty, 2000; Li *et al.*, 2008; Abeysekera, 2010; Ahmed Haji & Mohd Ghazali, 2013) telah menggunakan pendekatan dikotomi (tidak diberi bobot). Dalam pendekatan ini, nilai "0" ditetapkan untuk *non-disclosure* dan nilai "1" diberikan jika item tersebut muncul. Cooke (1989) berpendapat bahwa



pendekatan dikotomis lebih objektif daripada pendekatan tertimbang karena memberikan semua hal yang sama pentingnya. Demikian pula, Abeysekera (2010) berpendapat bahwa menetapkan bobot untuk berbagai jenis pengungkapan IC dapat menyebabkan kesalahan karena *scaling bias*. Konsisten dengan pekerjaan sebelumnya, setiap item pengungkapan IC diberikan bobot yang sama dalam penelitian ini. Laporan tahunan perusahaan setiap perusahaan diperiksa oleh peneliti untuk mengidentifikasi kemunculan 24 kata kunci, dan skor dicatat pada lembar pengkodean. Total nilai pengungkapan dihitung untuk setiap perusahaan, dan indeks dibangun untuk mengukur tingkat pengungkapan relatifnya. Indeks ini adalah rasio dari skor pengungkapan yang sebenarnya dari perusahaan semaksimal mungkin (yaitu, 24).

3.1.1. Variabel Independen

Di dalam penelitian ini ada empat variabel independen, yaitu ukuran dewan komisaris (*BSIZE*), kepemilikan *blockholder* (*BLOCK*), kepemilikan pemerintah (*GOV*), dan masa jabatan dewan komisaris (*BTENURE*). Masing-masing variabel akan dijelaskan pada tiap-tiap sub-bab di bawah ini.

2.3.4.1. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah total dewan komisaris yang sedang menjabat di dalam perusahaan. Penelitian ini menggunakan pengukuran yang umum untuk ukuran dewan komisaris komisaris. Jumlah dewan komisaris digunakan untuk mengukur ukuran dewan komisaris komisaris (Alfraih, 2018).

2.3.4.2. Kepemilikan *Blockholder*



Kepemilikan *blockholder* adalah persentase kepemilikan saham dari para *blockholder* dari jumlah total saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan pengukuran yang umum untuk kepemilikan *blockholder*. Proporsi dari saham biasa yang dimiliki blokir paling sedikit 5% dari jumlah saham yang diterbitkan digunakan untuk mengukur kepemilikan *blockholder* (Alfraih, 2018).

2.3.4.3. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah persentase kepemilikan saham dari pemerintah dari jumlah total saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Dalam pengukuran kepemilikan pemerintah, penelitian ini menggunakan proporsi dari saham biasa yang dimiliki pemerintah paling sedikit 5% dibandingkan total saham yang diterbitkan (Alfraih, 2018).

2.3.4.4. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan dewan komisaris adalah jumlah rata-rata masa jabat yang dimiliki oleh dewan komisaris di dalam perusahaan. Dalam pengukuran masa jabatan dewan komisaris, penelitian ini menggunakan jumlah rata-rata jangka waktu (tahun) dewan komisaris bekerja di dalam perusahaan (Handajani *et al.*, 2014).

3.1.2. Variabel Kontrol

Terdapat tiga variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan (SIZE), struktur modal perusahaan (LEV) dan kinerja perusahaan (ROA).



Definisi operasional tiap variabel dependen dan independen sekaligus ketiga variabel kontrol yang digunakan oleh Alfraih (2018) dan Handajani *et al.* (2014) akan dijelaskan pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Acuan
Variabel Dependen			
ICD	Pengungkapan yang terdiri dari modal internal, modal eksternal, dan modal manusia	Jumlah dari komponen modal intelektual di dalam laporan tahunan, dibagi dengan kemungkinan terbanyak ((24)	Alfraih (2018)
Variabel Independen			
BFSIZE	Jumlah total dewan komisaris yang sedang menjabat di dalam perusahaan	Jumlah total dari anggota dewan komisaris	Alfraih (2018)



BLOCK Persentase Proporsi dari jumlah Alfraih
 kepemilikan kepemilikan saham (2018)
 saham dari para yang dimiliki oleh
blockholder dari *blockholder* (yang
 jumlah total memiliki saham di
 saham yang atas 5%) dibandingkan
 diterbitkan oleh total saham yang
 perusahaan diterbitkan

GOV Kepemilikan Proporsi dari jumlah Alfraih
 pemerintah kepemilikan saham (2018)
 adalah yang dimiliki oleh
 persentase pemerintah (yang
 kepemilikan memiliki saham di
 saham dari atas 5%) dibandingkan
 pemerintah dari total saham yang
 jumlah total diterbitkan
 saham yang
 diterbitkan oleh
 perusahaan

BTENURE Jumlah rata-rata Jumlah rata-rata Handajani
 masa jabat yang jangka waktu dewan *et al.*
 dimiliki oleh komisaris bekerja di (2014)
 dewan komisaris dalam perusahaan



Variabel Kontrol	
SIZE	Ukuran perusahaan
LEV	Leverage
ROA	Kinerja perusahaan

Log dari total asset perusahaan	Alfraih (2018)
Total hutang dibagi total aset	Alfraih (2018)
Laba bersih dibagi total aset	Alfraih (2018)

3.2. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan bank di Indonesia. Penilaian kinerja modal intelektual sangat diperlukan dalam perusahaan bank dimana perusahaan dituntut untuk selalu berinovasi dan memiliki strategi bagi pengembangan jasa ataupun produk yang dihasilkan, sehingga penting untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi.

Teknik *purposive sampling* dipilih sebagai teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu mengambil sampel berdasarkan ketersediaan informasi dan kesesuaian dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria dalam menentukan sampel penelitian ini sebagai berikut:



1. Perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan yang telah diaudit pada Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada 2015-2017.

3. Memberikan data yang peneliti butuhkan untuk mengukur variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol yang ditetapkan pada penelitian ini.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti memperoleh data dalam penelitian ini melalui laporan tahunan yang dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *bloomberg terminal*. Data untuk mengukur variabel pengungkapan IC (*ICD*), ukuran dewan komisaris (*BFSIZE*), kepemilikan *blockholder* (*BLOCK*), kepemilikan pemerintah (*GOV*), dan masa jabatan dewan komisaris (*BTENURE*) diperoleh melalui laporan tahunan.

Sedangkan untuk mengukur variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (*SIZE*), struktur modal perusahaan (*LEV*) dan kinerja perusahaan (*ROA*), peneliti memperoleh data melalui *bloomberg terminal*.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelusuran data sekunder melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan variabel penelitian.



3.5. Metode Analisis

Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai jenis atau teknik analisis statistik serta mekanisme penggunaan alat analisis dalam penelitian. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji korelasi dan uji hipotesis.

3.5.1. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara ringkas suatu data dengan melihat nilai rata-rata (*mean*), deviasi standar, varian, maksimum, minimum, *range*, *sum*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghazali, 2018:19). Pengujian uji statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui persebaran data seperti rata-rata (*mean*), deviasi standar, varian, maksimum, minimum, *range*, *sum*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi) dari variabel seluruh variabel dalam penelitian. Hasil *mean* digunakan dengan tujuan untuk mengetahui nilai rata-rata data penelitian dan hasil deviasi standar digunakan dengan tujuan untuk mengetahui sebaran besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Hasil *range* menunjukkan rentang jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum sedangkan hasil maksimum dan minimum digunakan dengan tujuan untuk mengetahui data tertinggi dan terendah dari data penelitian.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian, dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model yang diajukan dalam penelitian ini terdapat penyimpangan asumsi klasik atau tidak. Sebuah model yang baik harus memenuhi serangkaian uji asumsi



klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas.

2.3.4.5. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya (Ghazali, 2018:107). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai toleransi dan *Variance Inflation Factor* (*VIF*). Nilai toleransi dan *Variance Inflation Factor* (*VIF*) menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan *VIF* lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

2.3.4.6. Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2018: 111), uji autokorelasi menunjukkan ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik apabila model tersebut bebas dari masalah autokorelasi. Metode pengujian yang sering digunakan untuk mendeteksi adanya masalah autokorelasi adalah uji Durbin Watson. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Durbin – Watson (uji DW). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai d_U dan d_L , dimana nilai d_U dan d_L dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin – Watson. Ketentuan pengujian ini sebagai berikut :



- a. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- b. Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Nilai d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

2.3.4.7. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal maka dilakukan uji normalitas. Karena apabila asumsi distribusi normal ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk uji normalitas yaitu analisis grafik dan analisis statistik (Ghazali, 2018: 161). Dalam analisis uji grafik menggunakan *P-plot* atau yang biasa disebut *normal probability plot*. *P-plot* atau yang biasa disebut *normal probability plot* membandingkan distribusi normal dengan kumulatif. Apabila plotting data residual membentuk garis lurus diagonal maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual adalah normal. Sedangkan dalam analisis uji statistik menggunakan metode uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas menggunakan analisis grafik dianggap dapat menyempatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Dengan demikian penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-



Smirnov untuk menentukan normalitas distribusi data. Nilai residual dikatakan normal yaitu apabila *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05.

2.3.4.8. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak berubah, maka hal tersebut disebut Homoskedastisitas dan bila terjadi perbedaan atau berubah maka disebut dengan Heteroskedastisitas (Ghazali, 2018: 139). Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

3.5.3. Uji Hipotesis

Pengujian pada setiap hipotesis yang diajukan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dapat dibuktikan oleh koefisien determinasi (R^2). Uji signifikansi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial dilakukan menggunakan uji-t sementara itu pengujian secara bersama dilakukan menggunakan uji-F pada tingkat signifikan 0,05 atau 5% (lima persen).

2.3.4.9. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi variasi pada variabel dependen yang dijelaskan dalam regresi. Nilai R^2 berada diantara 0 sampai 1. Jika $R^2=0$ mempunyai arti tidak adanya hubungan antara variabel independen



terhadap variabel dependen, sebaliknya jika $R^2=1$ mempunyai arti adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

2.3.4.10. Uji Statistik F

Pengujian ini digunakan untuk menguji variabel dependen dengan variabel independen secara bersamaan. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% (lima persen). Diterima atau ditolaknyanya hipotesis diketahui berdasarkan kriteria-kriteria seperti:

1. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima. Dengan kata lain, variabel BSIZE, BLOCK, GOV, dan BTENURE berpengaruh terhadap ICD.
2. Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak. Dengan kata lain, variabel BSIZE, BLOCK, GOV, dan BTENURE tidak berpengaruh terhadap ICD.

2.3.4.11. Uji Statistik t

Pengujian ini bermanfaat untuk mengetahui kemampuan variabel independen secara individu dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Tingkat signifikan 0,05 atau 5% (lima persen) dilakukan saat menggunakan uji t. Hipotesis diterima atau ditolak dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika tingkat signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima. Variabel BSIZE, BLOCK, GOV, dan BTENURE berpengaruh terhadap ICD.
2. Jika tingkat signifikansi $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak. Variabel BSIZE, BLOCK, GOV, dan BTENURE tidak berpengaruh terhadap ICD.



2.3.4.12. Analisis Regresi Berganda

Kedua hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan uji regresi berganda. Selain dapat mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, analisis regresi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IC = \beta_0 + \beta_1 SIZE + \beta_2 OUT + \beta_3 BLOCK + \beta_4 GOV + \beta_5 BTENURE + \epsilon_i$$



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015-2017 merupakan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian. Sebanyak 141 perusahaan perbankan telah terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017. Sampel penelitian ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu perusahaan memiliki laporan tahunan tahun 2015-2017 dan memiliki data keuangan. Penelitian yang tidak memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini akan dikeluarkan dari sampel penelitian. Penjelasan tentang penentuan sampel penelitian akan dijelaskan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Data Hasil Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017	43
2	Perusahaan perbankan yang memiliki data informasi yang kurang lengkap	(1)
4	Jumlah perusahaan perbankan yang layak dijadikan sampel selama 3 tahun (2015-2017)	42

Sumber: Data output SPSS, data sekunder yang diolah 2020



Berdasarkan penjelasan ringkasan data yang ditunjukkan pada tabel 4.1, total sampel perusahaan perbankan dari tahun 2015-2017 yang sudah memenuhi kriteria adalah sebanyak 43 perusahaan.

4.2. Analisis Data

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang akan dijelaskan secara rinci.

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian ini akan memberikan deskripsi dari suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), deviasi standar, maksimum, dan minimum dari data penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.2

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Dewan (BSIZE)	126	2.0000	9.0000	4.674603	1.9008603
Kepemilikan Blockholder (BLOCK)	126	.0170	.9990	.515571	.2767569
Kepemilikan Pemerintah (GOV)	126	.0000	.6000	.080405	.1930644
Masa Jabatan Dewan (BTENURE)	126	.4170	13.3330	4.650143	3.1837507
SIZE	126	26.9270	34.6577	30.890825	1.9066622
LEV	126	.0189	1.0000	.777715	.2024971
ROA	126	-.1173	.0732	.005063	.0232835
ICD	126	.0000	.9580	.561135	.2469920
Valid N (listwise)	126				

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pengungkapan IC (ICD) merupakan variabel dependen dari penelitian ini menunjukkan nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 0,985, yang artinya bahwa sampel dari perusahaan yang memiliki nilai ICD 0,00 yang ditunjukkan oleh Bank Nationalnobu merupakan perusahaan yang mengungkapkan ICD yang rendah dan nilai 0,958 yang ditunjukkan oleh Bank Rakyat Indonesia merupakan perusahaan yang mengungkapkan ICD yang tinggi. Nilai rata-rata adalah sebesar 0,561 dan memiliki nilai deviasi standar sebesar



0,264. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh bahwa nilai rata-rata lebih besar daripada nilai deviasi standarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa variasi data dapat dikatakan besar dimana nilai setiap sampel berada menyebar dari nilai rata-rata hitungannya. Selain itu diperoleh nilai rata-rata pengungkapan IC yang menengah dari hasil uji statistik, yang menunjukkan bahwa kebanyakan perusahaan yang masuk ke dalam sampel pengungkapan IC yang cenderung tinggi. Variasi dari pengungkapan IC yang tinggi ini juga mengarahkan ke penelitian yang lebih detail dari peranan tata kelola perusahaan.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Empat pengujian, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedasitas dilakukan untuk pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan pada data penelitian ini. Penjelasan lebih lanjut akan dilakukan pada sub-bab selanjutnya.

4.2.2.1. Uji Multikolinearitas

Ghazali (2018:107) mengungkapkan uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel independen dalam model memiliki hubungan atau korelasi. Menurut peraturan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*, apabila VIF melewati angka 10 atau *Tolerance* kurang dari 0,10, maka dapat dinyatakan telah terjadi gejala multikolinieritas, tetapi apabila harga VIF kurang dari 10 atau *tolerance* lebih dari 0,10, maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Pengujian multikolinieritas akan dijelaskan pada tabel 4.3 dari model regresi yang telah dilakukan.



Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas Model Regresi

<i>Collinearity Statistics</i>		
<i>Model</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
BSIZE	0.374	2.672
BLOCK	0.953	1.049
GOV	0.568	1.759
BTENURE	0.729	1.372
SIZE	0.303	3.295
LEV	0.740	1.351
ROA	0.731	1.367

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa angka *tolerance* $< 0,10$ dan angka *VIF* < 10 di setiap variabel pada penelitian ini. Angka tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

4.2.2.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan periode sebelumnya dalam model regresi (Ghazali, 2018:111).



Tabel 4.4
Uji Autokorelasi Model Regresi

<i>Model</i>	Durbin-Watson
1	1,911

Sumber: Data output SPSS, data sekunder yang diolah 2020

Dari tabel 4.4 diatas, nilai Durbin-Watson dari model regresi sebesar 1,911. Dilihat dari tabel Durbin-Watson, dengan jumlah sampel (N) sebesar 126 dan jumlah variabel (k) sebanyak 8, dan nilai dU sebesar 1,845. Hasil uji diatas menunjukkan bahwa $dU < d < (4 - dU)$ atau $1,845 < 1,911 < 2,154$. Maka berdasarkan hasil tersebut, variabel dalam penelitian ini bebas dari gejala autokorelasi.

4.2.2.3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan Untuk mengetahui apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Pengujian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang didapat dari hasil olah data SPSS adalah sebagai berikut



Tabel 4.5
Uji Normalitas Model Regresi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>	126
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,856

Sumber: Data output SPSS, data sekunder yang diolah 2020

Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada penelitian ini. Hasilnya menunjukkan nilai Asymptotic Sig (P-value) sebesar 0,856

Ghazali (2018) menyatakan bahwa data penelitian akan dikatakan terdistribusi secara normal jika hasil uji menunjukkan nilai $Sig > 0,05$. Oleh karena Asymptotic Sig sebesar $0,856 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini sudah terdistribusi dengan normal.

4.2.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Ghazali (2018:137) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Bila terjadi gejala heteroskedastisitas dapat menyebabkan akibat varians koefisien regresi menjadi *minimum* dan *confidence interval* melebar sehingga pengujian signifikansi statistik menjadi tidak

valid. *Output* dari pengujian ini dihasilkan menggunakan uji Glejser yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

Tabel 4.7

Uji Heteroskedastisitas Model Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.307	.261		1.175	.242
Ukuran Dewan (BSIZE)	-.005	.008	-.087	-.608	.544
Kepemilikan Blockholder (BLOCK)	-.043	.036	-.105	-.1175	.242
1 Kepemilikan Pemerintah (GOV)	.022	.067	.037	.323	.747
Masa Jabatan Dewan (BTENURE)	.006	.004	.178	1.735	.085
SIZE	-.006	.009	-.098	-.613	.541
LEV	.058	.056	.105	1.032	.304
ROA	-.388	.493	-.081	-.788	.432

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data output SPSS, data sekunder yang diolah 2020

Dari tabel 4.7 di atas menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dimana jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Oleh karena itu, melihat bahwa $Sig > 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas lebih lanjut mengenai hasil uji hipotesis dengan menggunakan model regresi linear berganda.



4.2.3. Uji Hipotesis

Model regresi linear berganda dengan estimasi *ordinary least square* (OLS) digunakan dalam menguji keempat hipotesis dari penelitian ini. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil uji yang telah dilakukan yaitu koefisien determinasi (R^2), uji signifikan parameter individual (uji statistik t), dan uji signifikansi simultan (uji statistik f).

4.2.3.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar variasi atau perubahan yang terjadi pada variabel independen mempengaruhi variabel dependen, dengan kisaran nilai 0 hingga 1. Hasil pengujian hipotesis menggunakan koefisien determinasi pada tiap model regresi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8

Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model Regresi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,623	0,388	0,345	0,19976

Sumber: Data output SPSS, data sekunder yang diolah 2020

Untuk memeriksa model regresi diatas, *Adjusted R Square* digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Nilai koefisien determinasi dalam model regresi yang



ditunjukkan pada tabel 4.8 sebesar 0,345 atau 34,5%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa 34,5% variasi variabel dependen yaitu pengungkapan IC dapat diterangkan oleh ukuran dewan komisaris, kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintah, dan masa jabatan dewan komisaris sebagai variabel independen dalam model regresi. Serta ukuran perusahaan, *leverage*, dan ROA sebagai variabel kontrol juga terikat dalam penjelasan dari variabel dependen, sedangkan 65,5% sisanya diterangkan oleh faktor lain diluar model.

4.2.3.2. Uji Statistik *t*

Uji *t* atau uji signifikan parameter individual digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen (Ghazali, 2018:98). Apabila hasil dari uji statistik menunjukkan *p-value* tidak lebih dari 0,1 atau 10% maka hasil dari uji statistik *t* dapat diterima. Tabel 4.9 akan menunjukkan hasil dari uji hipotesis untuk model regresi.



H2: Ada pengaruh positif antara kepemilikan *blockholder* dan tingkat pengungkapan IC, *ceteris paribus*

Nilai t dari variabel kepemilikan *blockholder* (X3) sebesar 0,171 dengan signifikansi (sig) sebesar 0,011. Dikarenakan sig sebesar $0,011 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Koefisien regresi dari variabel kepemilikan *blockholder* sebesar 0,171 menyatakan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% pada kepemilikan *blockholder* akan menambah 17,1% pada pengungkapan IC. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan *blockholder* berpengaruh positif terhadap variabel ICD.

H3: Ada pengaruh positif antara kepemilikan pemerintah dan tingkat pengungkapan IC, *ceteris paribus*

Nilai t pada variabel kepemilikan pemerintah (X4) sebesar 0,409 dengan signifikansi (sig) sebesar 0,002. Dikarenakan sig sebesar $0,001 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. Koefisien regresi dari variabel ukuran dewan komisaris sebesar 0,409 menyatakan bahwa setiap penambahan sebesar 1% pada ukuran dewan komisaris akan menambah 40,9% pada pengungkapan IC. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap variabel ICD.

H4: Ada pengaruh negatif antara masa jabatan dewan komisaris komisaris dan tingkat pengungkapan IC, *ceteris paribus*

Nilai t untuk variabel masa jabatan dewan komisaris (X5) sebesar 0,004 dengan tingkat signifikansi (sig) sebesar 0,512. Karena tingkat signifikansi sebesar



0,512 > 0,05, dapat disimpulkan bahwa H₄ diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa peningkatan atau penurunan dari variabel ICD tidak dipengaruhi oleh variabel masa jabatan dewan komisaris.

Dalam uji *t* yang dilakukan pada variabel kontrol, koefisien *beta* yang dihasilkan pada variabel ukuran perusahaan, *leverage* dan ROA menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan (*p value* < 0,050). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan ukuran, *leverage* dan ROA yang lebih besar berpengaruh dengan pengungkapan IC yang lebih tinggi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

4.2.3.3. Uji Statistik F

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, maka perlu dilakukan Uji F. Hasil uji hipotesis menggunakan uji statistik F pada model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10

Uji Statistik F Model Regresi

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	2.957	8	0.370	9.262	0.000
	<i>Residual</i>	4.669	117	0.040		
	<i>Total</i>	7.626	125			

Sumber: Data output SPSS, data sekunder yang diolah 2020



Tabel 4.8 menunjukkan hasil ujian statistik F pada model regresi. Dari hasil output SPSS pada tabel ANOVA menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 9,262 dengan p -value sebesar 0,000. Dikarenakan p -value $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yaitu pengungkapan modal intelektual secara simultan.

4.3. Analisis Data

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil pengujian atas kelima hipotesis dalam penelitian. Interpretasi atas hasil pengujian hipotesis akan disajikan pada tabel 4.9. Penjelasan untuk hasil pengujian tersebut akan dijelaskan secara detail pada sub-bab selanjutnya di bawah ini.

Tabel 4.11

Interpretasi Hasil

Hipotesis	B	Sig	Kesimpulan
Ada pengaruh positif antara ukuran dewan komisaris dan pengungkapan IC, <i>ceteris paribus</i>	0,055	0,000	H1 diterima
Ada pengaruh positif antara kepemilikan <i>blockholder</i> dan tingkat pengungkapan IC, <i>ceteris paribus</i>	0,171	0,011	H2 diterima



Ada pengaruh positif antara kepemilikan pemerintah dan tingkat pengungkapan IC, *ceteris paribus* 0,409 0,001 H3 diterima

Ada pengaruh negatif antara masa jabatan dewan komisaris komisaris dan tingkat pengungkapan IC, *ceteris paribus* 0,004 0,512 H4 ditolak

4.3.1. Ada Pengaruh Positif antara Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan IC, *Ceteris Paribus*

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan IC pada perusahaan perbankan di Indonesia diuji melalui pengujian hipotesis pertama. Hasil dari pengujian menunjukkan tingkat signifikansi atau *p-value* sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan koefisien beta sebesar 0,055 sehingga hipotesis pertama diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh positif antara ukuran dewan komisaris dan pengungkapan IC.

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara ukuran dewan komisaris dan pengungkapan IC.

Artinya, semakin besar jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan menandakan semakin tingginya pengungkapan IC yang dihasilkan. Dari perspektif teori agensi, jumlah dewan komisaris yang lebih besar akan lebih mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi karena ada lebih banyak orang untuk



melaksanakan pekerjaan. Menambahkan lebih banyak anggota ke dewan komisaris memberikan informasi dan sumber daya yang berpotensi memiliki manfaat. Jadi, dewan yang lebih besar secara langsung meningkatkan daya saing perusahaan dan meningkatkan lingkungan perusahaan atas keterbukaan informasi dan pengungkapan yang lebih luas. Selain itu, dapat dikatakan bahwa jumlah dewan yang lebih besar akan lebih besar kemungkinannya untuk mendeteksi masalah keagenan, karena dewan tersebut menawarkan keahlian yang lebih besar, pengawasan ke manajemen dan akses ke sumber daya yang lebih luas.

Hasil ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Alfraih (2018), Abeysekera (2010), Rodrigues *et al.* (2016), dan Ahmed Haji dan Mohd Ghazali (2013). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara ukuran dewan komisaris dan menyatakan bahwa dengan lebih besarnya jumlah anggota dewan di dalam perusahaan akan meminimalkan asimetri informasi karena dapat menawarkan keterampilan, pengendalian terhadap manajemen, dan jangkauan dari akses sumber daya yang lebih besar.

4.3.2. Ada Pengaruh Positif antara Kepemilikan *Blockholder* dan Pengungkapan IC, *Ceteris Paribus*

Pengujian hipotesis ketiga digunakan untuk menguji pengaruh yang positif antara kepemilikan *blockholder* dan pengungkapan IC pada perusahaan perbankan di Indonesia. Hasil dari pengujian menunjukkan tingkat signifikansi atau *p-value* sebesar 0,011 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,050 dan koefisien beta sebesar



0,171 sehingga hipotesis ketiga diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh positif antara kepemilikan *blockholder* dan pengungkapan IC.

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemilikan *blockholder* dan pengungkapan IC.

Artinya, semakin besar proporsi kepemilikan *blockholder* dalam perusahaan menandakan semakin tingginya pengungkapan IC yang dihasilkan. Dari perspektif teori agensi, berpendapat bahwa mekanisme kontrol yang efektif yang dapat mengurangi biaya agensi dan memaksa manajer bertindak demi kepentingan pemegang saham. Sumber daya dan keahlian mereka memiliki artian bahwa pemilik blok saham yang besar memiliki dorongan lebih besar untuk memantau dan mendisiplinkan manajer untuk mengatasi masalah kebebasan dalam bertindak yang dihasilkan dari kepemilikan yang tersebar pemegang saham besar, yang juga dikenal sebagai *blockholders*, memainkan peran penting dalam tata kelola, karena ukuran saham mereka di perusahaan memberikan dorongan untuk menanggung biaya manajer pemantauan. Demikian pula, ketika pemegang saham tidak memiliki kepentingan mayoritas (yaitu kepemilikan yang tersebar luas), hal itu kurang ekonomis bagi pemegang saham individu untuk mengeluarkan biaya pemantauan yang signifikan, karena mereka hanya akan menerima manfaat yang kecil. Dengan demikian, *blockholder* dapat membantu meningkatkan kualitas pelaporan dan transparansi dari pengungkapan IC.

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Alfraih (2018) dan Gan *et al.* (2013). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan *blockholder* dan pengungkapan



IC. Dan penelitian tersebut juga menyatakan bahwa dengan kepemilikan *blockholder* yang lebih tinggi menawarkan dengan lebih baik terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh investor dengan memantau dan mendisiplinkan manajer, dan meningkatkan pengungkapan IC perusahaan.

4.3.3. Ada Pengaruh Positif antara Kepemilikan Pemerintah dan Pengungkapan IC, *Ceteris Paribus*

Pengujian hipotesis keempat digunakan untuk menguji pengaruh yang positif antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan IC pada perusahaan perbankan di Indonesia. Hasil dari pengujian menunjukkan tingkat signifikansi atau *p-value* sebesar 0,001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,050 dan koefisien beta sebesar 0,409 sehingga hipotesis keempat diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh positif antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan IC.

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan IC. Artinya, semakin besar proporsi kepemilikan pemerintah dalam perusahaan menandakan semakin tingginya pengungkapan IC yang dihasilkan. Dari perspektif teori agensi, pemerintah cenderung untuk melihat praktik tata kelola perusahaan yang baik dan pengungkapan sebagai tindakan yang melindungi pemegang saham dan mengurangi asimetri informasi. Manajemen menggunakan pengungkapan sukarela untuk memberi sinyal kepada pihak berwenang dan masyarakat pada umumnya bahwa mereka telah menerapkan kebijakan pemerintah di bidang-bidang sumber daya manusia, lebih khususnya tentang *Human Capital*. Dengan tingginya



kepemilikan pemerintah, maka tingkat pengungkapan IC akan lebih luas terutama di bidang sumber daya manusia karena mereka cenderung lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia masyarakatnya.

Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian sebelumnya oleh Firer dan Williams (2015), Gan *et al.* (2013), dan Ahmed Haji dan Mohd Ghazali (2013). Penelitian tersebut menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan IC, serta menyatakan argumentasi tentang adanya kepemilikan pemerintah yang tinggi mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih luas yang mana selain untuk menarik investor, pemerintah juga dapat melihat kondisi masyarakatnya sendiri tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusianya.

4.3.4. Ada Pengaruh Negatif antara Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Pengungkapan IC, *Ceteris Paribus*

Pengujian hipotesis kelima digunakan untuk menguji pengaruh yang negatif antara masa jabatan dan pengungkapan IC pada perusahaan perbankan di Indonesia.

Hasil dari pengujian menunjukkan tingkat signifikansi atau *p-value* sebesar 0,512 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,100 dan koefisien beta sebesar -0,004 sehingga hipotesis kelima ditolak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa masa jabatan dewan komisaris komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan IC.

Sementara dari kondisi yang terjadi di Indonesia, sebagian perusahaan cenderung memberikan informasi yang lebih luas dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan apabila terjadi pergantian anggota dewan komisaris di dalam



periode berjalan, maka perusahaan akan tetap memperbaiki laporan tahunan yang diterbitkan tanpa melihat lamanya waktu dari anggota dewan komisaris yang telah bekerja di perusahaan tersebut.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian terdahulu oleh Handajani *et al.* (2014), Vafeas (2003), dan Byrd *et al.* (2010). Mereka menyatakan bahwa semakin singkat masa jabatan dewan komisaris berpengaruh terhadap semakin tingginya pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR bersifat *voluntary*, yang mana memiliki sifat yang sama dari pengungkapan IC.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintah, dan masa jabatan dewan komisaris terhadap pengungkapan IC. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015-2017 secara berturut-turut menjadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan *framework* yang diajukan oleh J. Guthrie *et al.* (2004) dan diaplikasikan kembali oleh Whiting dan Miller (2008), Branco *et al.* (2010), dan Alfraih (2018), untuk mengetahui tingkat dari pengungkapan IC, penelitian ini menggunakan analisis konten dari laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 2015-2017. Setelah menentukan tingkat pengungkapan IC, hubungan antara pengungkapan IC dan kelima hipotesis diuji menggunakan regresi linear berganda. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa ukuran dewan komisaris, kepemilikan *blockholder*, dan kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan IC. Sementara, di dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa masa jabatan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan IC.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini sebagai berikut:



1. Penelitian terbatas menggunakan sampel perusahaan di sektor perbankan sebagai gambaran atas pengungkapan modal intelektual di Indonesia.

2. Dari aspek struktur kepemilikan dari tata kelola perusahaan, terdapat variabel kepemilikan *blockholder* yang memiliki pengertian tentang kepemilikan saham di atas 5% oleh individu, keluarga, institusional dan manajerial sehingga masih bersifat umum dan bisa dilakukan investigasi yang lebih mendalam.

3. Subjektivitas tentang pemahaman dari *framework* yang digunakan untuk menentukan tingkat pengungkapan IC. Perbedaan pemahaman serta pandangan peneliti mengindikasikan adanya subjektivitas dari penelitian yang dilakukan.

5.3. Saran

Untuk perkembangan penelitian selanjutnya maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel perusahaan dari berbagai sektor industri yang ada di Indonesia.

2. Dari aspek struktur kepemilikan, penelitian selanjutnya dapat lebih spesifik mengenai kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan perorangan atau individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rashid, A., Kamil Ibrahim, M., Othman, R., & Fong See, K. (2012). IC disclosures in IPO prospectuses: evidence from Malaysia. *13*(1), 57-80. doi:doi:10.1108/14691931211196213
- Abeysekera, I. (2010). The influence of board size on modal intelektual disclosure by Kenyan listed firms. *Journal of Modal intelektual*, *11*(4), 504-518. doi:10.1108/14691931011085650
- Abeysekera, I., & Guthrie, J. (2005). An empirical investigation of annual reporting trends of modal intelektual in Sri Lanka. *Critical Perspectives on Accounting*, *16*(3), 151-163. doi:10.1016/s1045-2354(03)00059-5
- Ahmed Haji, A., & Mohd Ghazali, N. A. (2013). A longitudinal examination of modal intelektual disclosures and corporate governance attributes in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, *21*(1), 27-52. doi:10.1108/13217341311316931
- Alcaniz, L., Gomez-Bezares, F., & Ugarte, J. V. (2015). Firm characteristics and modal intelektual disclosure in IPO prospectuses. *Academia Revista Latinoamericana de Administración*, *28*(4), 461-483. doi:10.1108/arla-09-2014-0134
- Alfraih, M. M. (2018). The role of corporate governance in modal intelektual disclosure. *International Journal of Ethics and Systems*, *34*(1), 101-121. doi:10.1108/ijoes-02-2017-0026
- Anam Ousama, A., Fatima, A. H., & Rashid Hafiz-Majdi, A. (2012). Determinants of modal intelektual reporting. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, *2*(2), 119-139. doi:10.1108/20421161211229808
- Arifin, Z. (2003). Masalah Keagenan dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia. *Disertasi Tidak Dipublikasikan*(Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Indonesia).
- Bebchuk, L. A., & Cohen, A. (2003). The Costs of Entrenched Boards. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.556987
- Berberich, G., & Niu, F. (2011). Director Busyness, Director Tenure and the Likelihood of Encountering Corporate Governance Problems. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.1742483



Bonazzi, L., & Islam, S. M. N. (2007). Agency theory and corporate governance: A study of the effectiveness of board in their monitoring of the CEO. 2(1), 7-23. doi:doi:10.1108/17465660710733022

Bozzolan, S., O'Regan, P., & Ricceri, F. (2006). Modal intelektual disclosure (ICD). *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 10(2), 92-113. doi:10.1108/14013380610703111

Branco, M. C., Kapardis, M. K., Delgado, C., Sá, M., & Sousa, C. (2010). An analysis of modal intelektual disclosure by Portuguese companies. *EuroMed Journal of Business*, 5(3), 258-278. doi:10.1108/14502191011080809

Brüggen, A., Vergauwen, P., & Dao, M. (2009). Determinants of modal intelektual disclosure: evidence from Australia. *Management Decision*, 47(2), 233-245. doi:10.1108/00251740910938894

Byrd, J., Cooperman, E. S., & Wolfe, G. A. (2010). Director tenure and the compensation of bank CEOs. *Managerial Finance*, 36(2), 86-102. doi:10.1108/03074351011014523

Cerbioni, F., & Parbonetti, A. (2007). Exploring the Effects of Corporate Governance on Modal intelektual Disclosure: An Analysis of European Biotechnology Companies. *European Accounting Review*, 16(4), 791-826. doi:10.1080/09638180701707011

CFA. (2007). A Comprehensive Business Reporting Model: Financial Reporting for Investors. *Standards and Position Papers*.

Cooke, T. E. (1989). Voluntary Corporate Disclosure by Swedish Companies. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 1(2), 171-195. doi:10.1111/j.1467-646X.1989.tb00009.x

Donnelly, R., & Mulcahy, M. (2008). Board Structure, Ownership, and Voluntary Disclosure in Ireland. *Corporate Governance: An International Review*, 16(5), 416-429. doi:10.1111/j.1467-8683.2008.00692.x

Dou, Y., Hope, O.-K., Thomas, W. B., & Zou, Y. (2016). Individual Large Shareholders, Earnings Management, and Capital-Market Consequences. *Journal of Business Finance & Accounting*, 43(7-8), 872-902. doi:10.1111/jbfa.12204

Edmans, A. (2014). Blockholders and Corporate Governance. *Annual Review of Financial Economics*, 6(1), 23-50. doi:10.1146/annurev-financial-110613-034455



Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1). doi:10.2307/258191

Elshandidy, T., & Neri, L. (2015). Corporate Governance, Risk Disclosure Practices, and Market Liquidity: Comparative Evidence from the UK and Italy. *Corporate Governance: An International Review*, 23(4), 331-356. doi:10.1111/corg.12095

Eng, L. L., & Mak, Y. T. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22(4), 325-345. doi:10.1016/s0278-4254(03)00037-1

Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 301-325. doi:10.1086/467037

FASB. (2001). Improving Business Reporting: Insights into Enhancing Voluntary Disclosures. *The Financial Standards Accounting Boards*.

Fauzi, F. (2012). Equity Ownership and Capital Structure Determinants: A Study of New Zealand-Listed Firms. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.2047218

Fich, E. M., & Shivdasani, A. (2006). Financial Fraud, Director Reputation, and Shareholder Wealth. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.687412

Firer, S., & Williams, S. M. (2015). Firm ownership structure and modal intelektual disclosures. *South African Journal of Accounting Research*, 19(1), 1-18. doi:10.1080/10291954.2005.11435116

Gamerschlag, R. (2013). Value relevance of Human Capital information. *Journal of Modal intelektual*, 14(2), 325-345. doi:10.1108/14691931311323913

Gan, K., Saleh, Z., Abessi, M., & Huang, C. C. (2013). Modal intelektual disclosure in the context of corporate governance. *International Journal of Learning and Modal intelektual*, 10(1). doi:10.1504/ijlic.2013.052077

García-Meca, E., & Martínez, I. (2005). Assessing the quality of disclosure on intangibles in the Spanish capital market. *European Business Review*, 17(4), 305-313. doi:10.1108/09555340510607352

Guthrie, J., & Petty, R. (2000). Modal intelektual: Australian annual reporting practices. *Journal of Modal intelektual*, 1(3), 241-251. doi:10.1108/14691930010350800



Guthrie, J., Petty, R., Yongvanich, K., & Ricceri, F. (2004). Using content analysis as a research method to inquire into modal intelektual reporting. *Journal of Modal intelektual*, 5(2), 282-293. doi:10.1108/14691930410533704

Hadiprajitno, P. B. (2013). Struktur Kepemilikan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, dan Biaya Keagenan di Indonesia (Studi Empirik pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal akuntansi dan Auditing*, 9(2), 97-127.

Handajani, L., Subroto, B., Sutrisno, T., & Saraswati, E. (2014). Does board diversity matter on corporate social disclosure? An Indonesian evidence. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5, 8-16.

He, J., Mahoney, J. T., & Wang, H. C. (2009). Firm capability, corporate governance and competitive behaviour: a multi-theoretic framework. *International Journal of Strategic Change Management*, 1(4). doi:10.1504/ijscm.2009.031408

Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31(1-3), 405-440. doi:10.1016/s0165-4101(01)00018-0

Hidalgo, R. L., García-Meca, E., & Martínez, I. (2010). Corporate Governance and Modal intelektual Disclosure. *Journal of Business Ethics*, 100(3), 483-495. doi:10.1007/s10551-010-0692-x

Huafang, X., & Jianguo, Y. (2007). Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure. *Managerial Auditing Journal*, 22(6), 604-619. doi:10.1108/02686900710759406

Jensen, M. C. (1993). The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. *The Journal of Finance*, 48(3). doi:10.1111/j.1540-6261.1993.tb04022.x

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. doi:10.1016/0304-405x(76)90026-x

Johanson, U., & Nilson, M. (1990). *Personalekonomi - en litteraturstudie*.

Kearns, D. B., Al-Bassam, M. M., Bibb, M. J., Bush, M. J., Chandra, G., & Buttner, M. J. (2014). Response Regulator Heterodimer Formation Controls a Key Stage in *Streptomyces* Development. *PLoS Genetics*, 10(8). doi:10.1371/journal.pgen.1004554



Kothari, S., & Kothari, S. P. (2000). The Role of Financial Reporting in Reducing Financial Risks in the Market. *Building an Infrastructure for Financial Stability, (Federal Reserve Bank of Boston Conference Series, No. 44)*, 89 - 102.

Li, J. (1994). Ownership structure and board composition: A multi-country test of agency theory predictions. *Managerial and Decision Economics*, 15(4), 359-368. doi:10.1002/mde.4090150409

Li, J., Pike, R., & Haniffa, R. (2008). Modal intelektual disclosure and corporate governance structure in UK firms. *Accounting and Business Research*, 38(2), 137-159. doi:10.1080/00014788.2008.9663326

Mak, Y. T., & Li, Y. (2001). Determinants of corporate ownership and board structure: evidence from Singapore. *Journal of Corporate Finance*, 7(3), 235-256. doi:10.1016/s0929-1199(01)00021-9

Meek, G. K., Roberts, C. B., & Gray, S. J. (1995). Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures By U.S., U.K. and Continental European Multinational Corporations. *Journal of International Business Studies*, 26(3), 555-572. doi:10.1057/palgrave.jibs.8490186

OECD. (2012). Corporate Reporting of Intangible Assets: A Progress Report.

Oliveira, L., Lima Rodrigues, L., & Craig, R. (2006). Firm-specific determinants of intangibles reporting: evidence from the Portuguese stock market. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 10(1), 11-33. doi:10.1108/14013380610672657

Petty, R., & Cuganesan, S. (2005). Voluntary Disclosure of Modal intelektual by Hong Kong Companies: Examining Size, Industry and Growth Effects Over Time. *Australian Accounting Review*, 15(36), 40-50. doi:10.1111/j.1835-2561.2005.tb00291.x

Petty, R., & Guthrie, J. (2000). Modal intelektual literature review. *Journal of Modal intelektual*, 1(2), 155-176. doi:10.1108/14691930010348731

Pulic, A. (1998). Measuring the Performance of Intellectual Potential in Knowledge Economy. *Paper presented at the 2nd McMaster Word Congress on Measuring and Managing Modal intelektual by the Austrian Team for Intellectual Potential.*

Rodrigues, L. L., Tejedo-Romero, F., & Craig, R. (2016). Corporate governance and modal intelektual reporting in a period of financial crisis: Evidence from Portugal. *International Journal of Disclosure and Governance*, 14(1), 1-29. doi:10.1057/jdg.2015.20



Rosenstein, S., & Wyatt, J. G. (1990). Outside directors, board independence, and shareholder wealth. *Journal of Financial Economics*, 26(2), 175-191. doi:10.1016/0304-405x(90)90002-h

Rutherford, M. A., & Buchholtz, A. K. (2007). Investigating the Relationship Between Board Characteristics and Board Information. *Corporate Governance: An International Review*, 15(4), 576-584. doi:10.1111/j.1467-8683.2007.00589.x

Soraya, L. (2013). PENGARUH NILAI ASET TIDAK BERWUJUD DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERHADAP NILAI PASAR PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2010). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1-9.

Sundaramurthy, C., Mahoney, J. M., & Mahoney, J. T. (1997). Board Structure, Antitakeover Provisions, and Stockholder Wealth. *Strategic Management Journal*, 18(3), 231-245. doi:10.1002/(sici)1097-0266(199703)18:3<231::Aid-smj877>3.0.Co;2-v

Sveiby, K. E. (1997). The Intangible Assets Monitor. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 2(1), 73-97. doi:10.1108/eb029036

Vafeas, N. (2003). Length of Board Tenure and Outside Director Independence. *Journal of Business Finance & Accounting*, 30(7-8), 1043-1064. doi:10.1111/1468-5957.05525

Vandemaele, S. N., Vergauwen, P. G. M. C., & Smits, A. J. (2005). Modal intelektual disclosure in The Netherlands, Sweden and the UK. *Journal of Modal intelektual*, 6(3), 417-426. doi:10.1108/14691930510611148

Verrecchia, R. E. (1983). Discretionary disclosure. *Journal of Accounting and Economics*, 5, 179-194. doi:10.1016/0165-4101(83)90011-3

White, G., Lee, A., & Tower, G. (2007). Drivers of voluntary modal intelektual disclosure in listed biotechnology companies. *Journal of Modal intelektual*, 8(3), 517-537. doi:10.1108/14691930710774894

Whiting, R. H., & Miller, J. C. (2008). Voluntary disclosure of modal intelektual in New Zealand annual reports and the "hidden value". *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 12(1), 26-50. doi:10.1108/14013380810872725

Whiting, R. H., & Woodcock, J. (2011). Firm characteristics and modal intelektual disclosure by Australian companies. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 15(2), 102-126. doi:10.1108/14013381111157337



LAMPIRAN A

DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
2	AGRS	Bank Agris
3	AMAR	Bank Amar Indonesia
4	ARTO	Bank Artos Indonesia
5	BABP	Bank MNC International
6	BACA	Bank Capital Indonesia
7	BBCA	Bank Central Asia
8	BBHI	Bank Harda Internasional
9	BBKP	Bank Bukopin
10	BBMD	Bank Mestika Dharma
11	BBRI	Bank Rakyat Indonesia
12	BBNI	Bank Negara Indonesia
13	BBTN	Bang Tabungan Negara
14	BBYB	Bank Yudha Bhakti
15	BCIC	Bank J Trust Indonesia
16	BDMN	Bank Danamon Indonesia
17	BEKS	Bank Pembangunan Daerah Banten
18	BGTB	Bank Ganesha
19	BINA	Bank Ina Perdana
20	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
21	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
22	BKSW	Bankl QNB Indonesia
23	BMAS	Bank Maspion Indonesia
24	BMRI	Bank Mandiri (persero)
25	BNBA	Bank Bumi Arta
26	BNGA	Bank CIMB Niaga
27	BNII	Bank Maybank Indonesia
28	BNLI	Bank Permata
29	BSIM	Bank Sinar Mas
30	BSWD	Bank Of India Indonesia
31	BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Nasional
32	BTPS	Bank Tabungan Pensiunan Syariah
33	BVIC	Bank Victoria Internasional
34	DNAR	Bank Oke Indonesia



35	INPC	Bank Artha Graha Internasional
36	MAYA	Bank Mayapada Internasional
37	MCOR	Bank China Construction Bank Ind
38	MEGA	Bank MEGA
39	NISP	Bank OCBC NISP
40	Nobu	Bank Nationalnobu
41	PNBN	Bank Pan Indonesia
42	PNBS	Bank Panin Syariah
43	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia



LAMPIRAN B

TABEL STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Dewan (BSIZE)	126	2.0000	9.0000	4.674603	1.9008603
Kepemilikan Blockholder (BLOCK)	126	.0170	.9990	.515571	.2767569
Kepemilikan Pemerintah (GOV)	126	.0000	.6000	.080405	.1930644
Masa Jabatan Dewan (BTENURE)	126	.4170	13.3330	4.650143	3.1837507
SIZE	126	26.9270	34.6577	30.890825	1.9066622
LEV	126	.0189	1.0000	.777715	.2024971
ROA	126	-.1173	.0732	.005063	.0232835
ICD	126	.0000	.9580	.561135	.2469920
Valid N (listwise)	126				